

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH  
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR CAMAT  
SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG)**

**SKRIPSI**

Oleh:  
**JUKHAIRIA RITONGA**  
NIM. 0502193217

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH  
KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KANTOR CAMAT  
SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Akuntansi Syariah UIN Sumatera Utara**

**Oleh:**

**JUKHAIRIA RITONGA**

**NIM. 0502193217**

**Program Studi**

**AKUNTANSI SYARIAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jukhairia Ritonga  
Nim : 0502193217  
Tempat/ Tanggal Lahir : Sei-semayang,20 Juli 2001  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Medan-Binjai Km 13 Kongsi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)**", benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 05 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Jukhairia Ritonga

Nim: 0502193217

SUMATERA UTARA MEDAN

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

Jukhairia Ritonga

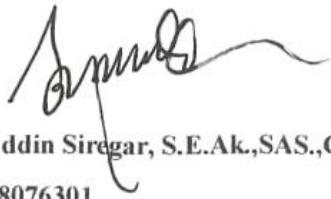
NIM. 0502193217

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) Pada Program Studi Akuntansi Syariah


Medan, 5 Juni 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



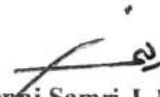
**Dr. Saparuddin Siregar, S.E.Ak.,SAS.,CA.,M.Ag**  
NIDN. 2018076301



**Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I**  
NIDN. 2026048901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



**Dr. Hj. Yenni Samri J. Nasution, M.A**  
NIDN. 2001077903

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Skripsi berjudul “Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)”. Atas nama Jukhairia Ritonga, NIM.0502193217, Program Studi Akuntansi Syariah telah diujikan dalam Sidang Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 18 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun) pada Program Studi Akuntansi Syariah.**

Medan, 18 Juli 2023

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Akuntansi Syariah UIN-SU

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Hj. Yenni Samri J. Nasution, M.A

NIDN.2001077903

  
Hendra Harmain, S.E., M.Pd

NIDN. 2010057302

Anggota Penguji,

  
Dr. Saparuddin Siregar, S.E.Ak.,SAS.,CA.,M.Ag


NIDN.2018076301

  
Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I

NIDN.2026048901

  
Dr. Mustafa Khalil Rokan, M.H

NIDN.2025077801

  
Nurul Inayah, M.E

NIDN.0103129201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

  
Prof. Dr. H. Muhammad Sukri Albani Nasution, S.H.I.,M.A  
NIDN.2006078401

## ABSTRAK

Jukhairia Ritonga, NIM. 0502193217. Skripsi berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)**”.

**Pembimbing I** Bapak Dr.Saparuddin Siregar, SE.Ak.,SAS.,CA.,M.Ag

**Pembimbing II** Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintahan untuk menambah tingkat mutu laporan keuangan pemerintahan daerah yang terdapat di Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Adapun permasalahan yang terdapat pada Kantor Camat Sunggal ini ialah seringkali terjadi perubahan sistem dan juga belum adanya laporan perubahan saldo anggaran lebih dan laporan arus kas dalam pembuatan laporan keuangan pada kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini adalah penelitian yang menerapkan teknik deskriptif kualitatif dengan metode mengumpulkan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil temuan menampilkan penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintahan memiliki potensi untuk menambah tingkat kualitas laporan keuangan pemerintahan Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian juga ditemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah sudah cukup baik pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang sudah memberikan limpahan karunia maupun rahmat-Nya untuk penulis hingga mampu menuntaskan tugas akhir ini yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Aceh Deli Serdang)**”. Shalawat berangkaikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi Wasallam yang selalu menjadi tauladan pada setiap aktivitas dan langkah kita agar selalu memiliki nilai ibadah serta memperoleh pahala yang diberi Allah SWT. Semoga seluruh sesuatu yang penulis laksanakan berhubungan pada tugas akhir ini juga menghasilkan nilai pahala di sisi-Nya.

Pada penyusunan tugas akhir ini, penulis berupaya menuntaskan tugas akhir ini dengan seluruh usaha yang hal tersebut tentunya bisa dilalui karena kehendak dan bantuan Allah SWT. Penulis juga sadar segala bentuk yang sempurna hanya milik Allah. Dan penulis sadar sebagai hamba tentu mempunyai batasan tetapi berupaya mencoba yang terbaik untuk membuat tugas akhir ini. Adapun tujuan dari penyusunan tugas akhir ini yaitu dijadikan satu dari berbagai syarat sebagai bentuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) program studi Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Terutama penulis tujukan pada beberapa pihak yang sudah bersedia memberikan bantuan dan seluruh yang diperlukan penulis untuk menuntaskan tugas akhir ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih pada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mengizinkan penulis untuk berkesempatan menduduki bangku perkuliahan di UIN Sumatera Utara.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Syukri Albani Nasution, S.H.I., M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih sudah memberikan

kesempatan pada penulis untuk dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.

3. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nasution, MA selaku ketua program studi Akuntansi Syariah.
4. Bapak Hendra Harmain, S.E. M.Pd selaku sekretaris Program studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Nurwani, M. Si selaku Dosen Penasehat Akademik penulis, yang selalu mendukung dan terus menyemangati penulis selama mengenyam bangku perkuliahan.
6. Bapak Dr.Saparuddin Siregar, SE.Ak., SAS., CA., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh keikhlasan dalam memberikan masukan dan pemikiran dan juga telah bersedia meluangkan waktu hingga skripsi ini bisa selesai.
7. Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh keikhlasan dalam memberikan masukan dan pemikiran dan juga telah bersedia meluangkan waktu hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Orang tua tercinta, Ayah Mulia Ritonga, S.Ag dan Mamak Royani Pohan yang senantiasa mendo'akan, senantiasa mencintai dan menyayangi penulis tanpa batas, selalu siap sedia di segala situasi dan kondisi, selalu menjadi tempat dalam berbagi hal, selalu punya solusi dari setiap permasalahan yang dikeluhkan penulis, juga selalu memberikan dukungan baik itu moril dan materiil kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kakak Fitriani Mardiah Ritonga, S.Pd, Abang Yusuf Pardamean Ritonga dan ketiga adik tersayang yaitu Khairul Mukhlis Ritonga, Siti Rahamdhani Ritonga, Mustahafa Ramadhan Ritonga yang selalu mendukung, menghibur dan memberikan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Keluarga besar Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Izzah UIN Sumatera Utara yang telah menjadi wadah kebaikan dalam berproses sekaligus rumah kedua ternyaman dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi penulis selama menduduki bangku perkuliahan.



11. Wardah Tuzahra Simamora yang telah bersedia menjadi sahabat paling perhatian dan tersayang yang terus menemani dan selalu siap sedia di segala kondisi dan menjadi tempat untuk bercerita dan saling curhat sepanjang pengerjaan skripsi.
12. Keluarga Akuntansi Syariah F UIN Sumatera Utara stambuk 2019 yang telah menjadi tempat untuk sama-sama berproses selama 4 tahun di bangku perkuliahan.



Medan, 30 Mei 2023

Penulis



Jukhairia Ritonga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORITIS.....</b>	<b>10</b>
<b>A. Kajian Teoritis.....</b>	<b>10</b>
1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	10
2. Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Islam.....	16
3. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
a. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah.....	20
b. Tujuan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	20
c. Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah.....	21
d. Sistem Pencatatan Dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.....	23
4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	24
a. Relevan.....	25
b. Andal.....	25
c. Dapat Dibandingkan.....	26
d. Dapat Dipahami.....	26

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	27
a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .	27
b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemda .....	28
c. Komponen Laporan Keuangan SKPD .....	30
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>33</b>
<b>C. Kerangka Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>39</b>
<b>C. Sumber dan Jenis Data .....</b>	<b>40</b>
<b>D. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>41</b>
<b>E. Metode Analisis Data .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB IV TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>58</b>
<b>C. Relevansi Laporan Keuangan Kantor Camat Sunggal         dengan Akuntansi Dalam Perspektif Islam.....</b>	<b>85</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>83</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Opini BPK-RI .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	38
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sunggal.....	51



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR TABEL

Table 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sunggal .....	7
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	40
Tabel 3.2 Keterkaitan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.....	43
Tabel 4.1 Nama Desa di Kecamatan Sunggal .....	46
Tabel 4.2 LRA Kecamatan Sunggal 2021.....	55
Tabel 4.3 LRA Kecamatan Sunggal 2020.....	56
Tabel 4.4 LRA Kecamatan Sunggal 2019.....	57
Tabel 4.5 Laporan Operasional Kecamatan Sunggal.....	58
Tabel 4.6 Neraca Kecamatan Sunggal .....	64
Tabel 4.7 Laporan Perubahan Ekuitas .....	74

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan reformasi yang terjadi di Indonesia memberikan pembaharuan pengetahuan perihal tata kelola finansial pemerintahan, berupa pemerintahan tingkatan pusat ataupun daerah. Sistematis tata kelola keuangan juga banyak terjadi perubahan sejalan dari zaman yang semakin berkembang dan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin maju. Sehingga fenomena tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembuatan keputusan di dalam pemerintahan. (Kakisina, 2020, hal.54)

Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kemajuan dan kesejahteraan bangsa ini adalah mengenai ketepatan dalam pengelolaan keuangan. Banyak sekali kita temui kendala-kendala untuk mengelola keuangan pemerintah berupa di tingkatan pusat dan juga daerah dan hal tersebut sudah selayaknya menjadi catatan kita bersama sebagai rakyat Indonesia. Dengan hal demikian pemerintah sebagai pemegang kebijakan dalam pengelolaan keuangan sudah seharusnya mempunyai kecakapan dalam pengoperasian pembuatan laporan finansial yang bermutu.

Penggunaan sistem teknologi informasi dalam akuntansi yang telah terkomputerisasi oleh perangkat lunak juga diperlukan untuk membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi adalah serangkaian bagian yang berkaitan satu dengan lainnya dan berguna dalam mengumpulkan, melakukan proses, dan sebagai penyimpanan informasi untuk membuat keputusan dan mengawasi suatu kelompok. Pemanfaatan teknologi ini sangat berpengaruh dalam peningkatan kehandalan laporan finansial pemerintahan daerah. (Fauziah, 2019, hal. 198)

Transparansi dan akuntabilitas untuk laporan keuangan adalah satu dari beberapa permasalahan yang masih sering diabaikan dalam pengaplikasian laporan keuangan dalam pemerintahan. Masih banyak kita temui isu-isu hangat perihal terdapat berbagai kasus mengenai mutu pelaporan keuangan buruk di

beberapa instansi pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut adalah akibat dari kurangnya pemahaman para akuntan pemerintahan mengenai standar akuntansi pemerintahan, kurangnya pemahaman terhadap kode etik akuntan publik dan juga pengendalian internal yang buruk sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap rendahnya mutu pelaporan keuangan pemerintahan.

Satu dari beberapa bentuk nyata untuk peningkatan keterbukaan maupun akuntabilitas dalam mengelola finansial Negara yaitu melalui mengimplementasikan dan menjalankan kebijakan akuntansi yang berlaku di suatu Negara dengan tepat dan sesuai pedoman yang berlaku. Pemerintah Daerah, memiliki hak dan wewenang dalam mengelola pemerintah dan kebutuhan publik berdasarkan pada kebijakan undang-undang yang hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pada hakikatnya laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang berada di sisi finansial terhadap sebuah instansi pemerintah serta penyusunan laporan keuangan minimal nya dibuat setahun sekali. Hal ini dikarenakan laporan keuangan merupakan gambaran dari peristiwa transaksi-transaksi pada suatu entitas. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai informasi bagi pemerintahan dalam membuat suatu kebijakan dalam mengambil suatu keputusan dan juga berfungsi bagi pihak eksternal pemerintahan seperti bank, investor ataupun perusahaan swasta. Secara umum, laporan keuangan pada pemerintahan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Perubahan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Laporan Arus Kas
6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam mewujudkan suatu perubahan yang baik di pemerintahan khususnya mengenai pengelolaan keuangan maka diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintahan pusat dengan Pemerintahan

daerah. Undang-undang tersebut telah memberi hak penuh bagi Pemerintah daerah dalam mengelola sendiri sumber dana dan menentukan alokasi dari penggunaan anggaran tetapi juga harus berpedoman terhadap Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintahan terus melakukan peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga terbitlah Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan tersebut mengelola ruang lingkup kawasan mencakup pengeluaran serta penerimaan daerah, hak kuasa milik daerah yang diatur oleh sendiri maupun pihak lainnya yang dikuasai oleh pemerintah daerah.

Pemerintah selalu berusaha melakukan berbagai kebijakan dalam menambah tingkat keterbukaan serta akuntabilitas dalam mengelola keuangan mewujudkan pengelolaan keuangan secara tepat dalam pemerintahan seperti dari selalu berusaha menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang merupakan petunjuk utama untuk susunan laporan keuangan pemerintahan.

Standar akuntansi Pemerintahan adalah acuan dalam memberi jaminan ketahanan untuk dalam penyusunan laporan keuangan. SAP digunakan pemerintah untuk memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga SAP harus menjadi landasan dan petunjuk untuk penyusunan pelaporan finansial pemerintah baik itu di tingkatan pusat dan di tingkatan daerah. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah sangat menentukan kualitas dari laporan keuangan.

Selanjutnya Kementerian Dalam Negeri membuat Peraturan pedoman dalam penggunaan kriteria akuntansi pemerintah dengan basis akrual terhadap pemerintah daerah yang dicantumkan pada Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 dan untuk mendukung peraturan tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku di Indonesia sekarang ini mengacu terhadap Keputusan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan



tersebut memuat mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah adalah suatu rangkaian sistematis dari penyelenggara atau prosedur dalam mewujudkan tujuan akuntansi dari menganalisis transaksi yang terjadi sampai dengan laporan keuangan di instansi pemerintahan daerah. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah diinginkan bisa memperoleh riwayat dalam pelaporan keuangan terhadap kegiatan bisnis yang ada pada sebuah institusi pemerintahan daerah dapat lebih tepat, akurat dan komprehensif sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat karakteristik kualitatif mengenai laporan keuangan berdasarkan PP. No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai berikut:

- a) Relevan
- b) Andal
- c) Dapat dipahami
- d) Dapat dibandingkan (Febransyah et al., 2021, hal.27)

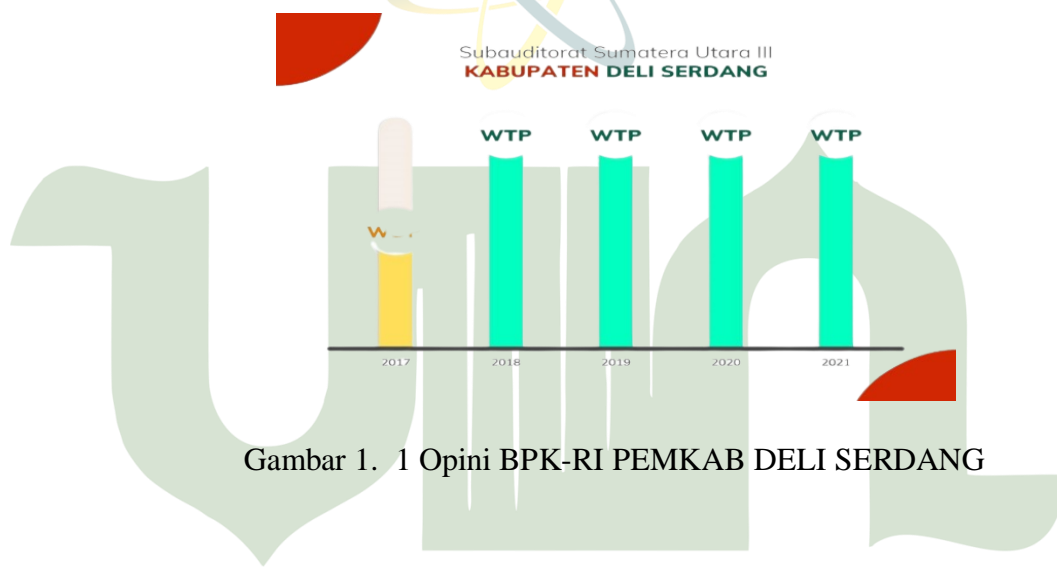
Tidak jauh berbeda dengan perusahaan, pada institusi pemerintah juga melaksanakan beberapa pengeluaran untuk melakukan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pada pemerintahan. Dengan demikian Pemerintah juga wajib melaksanakan beberapa usaha dalam mendapatkan pemasukan untuk biaya segala kebutuhan aktivitas yang dilakukan untuk pemerintahan, serta juga harus menghindari biaya berlebih yang mengakibatkan kerugian pada pemerintahan.

Untuk menjaga keefisienan dalam pengelolaan keuangan pemerintahan maka dibutuhkannya sistem untuk mengatur dan menjaga keakuratan suatu laporan keuangan, maka penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintahan yang tepat dan benar akan menjadi suatu landasan dalam pengendalian segala aktivitas keuangan yang terjadi pada pemerintahan.

Pada dasarnya pemerintahan ingin terciptanya keterbukaan maupun akuntabilitas pada proses pembuatan pelaporan keuangan dengan cara

penggunaan system akuntansi keuangan pemerintahan dan juga diperlukan proses audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang hal ini sangat diperlukan dalam tercapainya opini-opini seperti : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Pemberian opini yang dilaksanakan dari Lembaga Pemeriksaan Keuangan merupakan bentuk penghargaan pada hasil pengecekan pelaporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan yang dibuat Pemerintahan Daerah merupakan bentuk akuntabilitas keuangan.

### Opini BPK-RI Atas LKPD Tahun 2017-2021



Gambar 1. 1 Opini BPK-RI PEMKAB DELI SERDANG

Berdasarkan data diatas bahwa Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang terus berusaha melakukan perbaikan agar menghasilkan keakuratan dan kesempurnaan dalam laporan keuangan dibuktikan Kabupaten Deli Serdang memperoleh anggapan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 4 tahun berturut.

Kendala yang masih sering ditemui dalam penerapan sistem keuangan daerah di Kecamatan Sunggal adalah yaitu aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan masih terus mengalami

pembaharuan dan belum stabil. Hal tersebut tentunya sebagai hambatan untuk pelaporan laporan keuangan. Dari segi akuntabilitas, ketetapan indeks harga yang masih berubah-ubah membuat proses penyusunan RAB yang terhambat. (Khairun Mahfis & Dwi Rahmadiane, n.d., 2020, hal. 2)

Kabupaten Deli Serdang adalah satu dari kabupaten yang ada di bagian wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara yang luasnya mencapai 2.497.62 km. Kecamatan Sunggal adalah satu dari kecamatan yang berada di Kab. Deli Serdang. Kec. Sunggal mempunyai 17 Desa dan Kantor Camat Sunggal berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sei Semayang Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20351.

Kantor Kecamatan Sunggal adalah satu dari beberapa institusi pemerintahan sebagai suatu bentuk kelompok non-profit dengan tujuan dalam menambah tingkat layanan pada publik umumnya dengan meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan keamanan dan lain sebagainya. Kantor Camat Sunggal sudah menerapkan system pencatatan berbasis akrual (*acrual basis*).

Pengelolaan keuangan daerah ialah suatu aktivitas yang mencakup penyusunan rencana, penyelenggaraan, dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tata kelola keuangan daerah sudah sewajarnya menerapkan asas transparansi, akuntabilitas guna terdapat kedisiplinan terhadap anggaran yang dikelola. Satu dari beberapa laporan finansial yang bisa melihat hasil kerja pemerintahan daerah yaitu terdapat pada laporan realisasi anggaran yang berfungsi menjadi acuan atau cerminan kinerja pemerintahan daerah.

Tabel 1.1

## Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sunggal 2021

URAIAN	ANGGARAN N 2021	REALISASI 2021
PENDAPATAN DAERAH	1.042.200.00 0,00	341.774.000, 00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.042.200.00 0,00	341.774.000, 00
Retribusi Daerah	1.042.200.00 0,00	341.774.000, 00
BELANJA DAERAH	7.849.373.24 3,00	6.897.043.09 1,00
BELANJA OPERASI	7.764.045.89 9,00	6.897.043.09 1,00
Belanja Pegawai	3.936.519.20 7,00	3.629.990.72 6,00
Belanja Barang dan Jasa	3.827.526.69 2,00	3.270.052.36 5,00
BELANJA MODAL	85.327.344,0 0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.327.344,0 0	0,00

SURPLUS/(DE VISIT)	(6.807.173.2 43,00)	(6.555.269.0 91,00)
SILPA	(6.807.173.2 43,00)	(6.555.269.0 91,00)

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal 2021

Berdasarkan tabel realisasi anggaran diatas juga dapat kita lihat adanya selisih antara anggaran diawal periode dengan realisasi yang didapat dari akhir periode dan ini biasa kita sebut dengan surplus.

Terdapat beberapa kendala yang terjadi pada Kantor Camat Sunggal dalam penerapan system akuntansi Pemerintah dalam peningkatan kualitas laporan keuangan seperti:

1. Terdapat perubahan sistem aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang terus menerus sehingga menimbulkan kesulitan bagi bendahara umum dalam mengikuti perkembangan yang terbilang begitu sering dan dalam waktu yang cepat.
2. Adanya perubahan aturan seperti potongan dalam suatu kebijakan dan hanya disampaikan melalui web pemerintah kabupaten saja dan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kantor camat.
3. Kurang maksimalnya pengadaan Bimbingan Teknik (Bimtek) guna meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia dalam mengelola keuangan pemerintahan Daerah.
4. Tidak ada terdapat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam pembuatan laporan keuangan kantor camat Sunggal.

Dari adanya penjelasan di atas dan juga dari adanya berbagai fakta yang terdapat, maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian lebih lanjut

perihal tersebut yang berjudul “**Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah Kualitas Laporan Keuangan Kantor Camat Sunggal Telah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah .No 71 Tahun 2010?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan permasalahan yang dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan dengan berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui kesesuaian Laporan Keuangan Kantor Camat Semadam telah memiliki kualitas yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010

## **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa kegunaan yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu dengan berikut:

1. **Bagi Peneliti**

Penelitian yang dihasilkan bisa meningkatkan wawasan maupun pengalaman pada penulis dan menjadi bentuk implementasi terhadap sesuatu yang sudah dipahami ketika masa kuliah.

**2. Bagi Akademisi**

Menjadi bahan pedoman dalam berbagai riset selanjutnya serta diinginkan bisa meningkatkan pengetahuan dan referensi baru pada akademisi.

**3. Bagi Pemerintah**

Penelitian yang dihasilkan bisa berguna untuk memberi masukan terhadap mengurangi hambatan penggunaan sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah dalam menambah tingkat mutu laporan keuangan, terkhusus bagi Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang .



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Informasi yang terdapat pada akuntansi sangat dibutuhkan dalam suatu instansi yang bertujuan untuk mendapatkan keakuratan data dalam suatu instansi guna dalam pengambilan keputusan, sehingga diperlukan suatu sistem yang bisa bermanfaat bagi suatu instansi. Sistem merupakan suatu kesatuan yang mencakup berbagai sub system kesatuan yang sempit, yang saling berkaitan serta memiliki target tertentu.

Sistem merupakan sebuah gabungan oleh dua ataupun lebih subsistem ataupun komponen yang berkaitan satu dengan lainnya dan memiliki fungsi yang bertujuan serupa. Selain itu juga dapat dimaknai dengan sekumpulan bagian yang senantiasa bertugas bersama untuk mendapatkan sebuah target. Suatu system dapat dikatakan subsistem ketika terdapat kaitannya dengan system terbesar dan dijadikan komponen suatu system yang serupa. (Ryan et al., 2013, hal 8)

Sistem akuntansi juga dimaknai dengan suatu koneksi yang terbagi menjadi formulir, riwayat, tahapan, peralatan, dan tenaga kerja untuk dapat memperoleh data terhadap sebuah instansi dalam kepentingan pemeliharaan, operasional, dan juga mengambil keputusan untuk pihak yang membutuhkan. (Ryan et al., 2013, hal 18)

Penggunaan sistem akuntansi diterapkan pada pemerintah yaitu akuntansi dengan sistem mencakup tahapan penyusunan catatan, golongan, tafsiran, ringkasan kegiatan bisnis atas aktivitas keuangan untuk melaksanakan APBD yang dilakukan menurut beberapa prinsip pengolahan pada umumnya. (Ryan et al., 2013, hal 18)

Sistem akuntansi pemerintahan daerah (SAPD) yaitu serangkaian yang sistematis berdasarkan suatu proses, pelaksanaan, alat serta komponen lainnya



guna mewujudkan kegunaan akuntansi menurut analisa kegiatan bisnis hingga laporan finansial pada keuangan di lingkungan instansi pemerintahan daerah.(Pemerintah Republik Indonesia, 2019, hal 14)

Sistem akuntansi pemerintahan daerah yaitu suatu rangkaian proses yang diawali dengan tahapan mengumpulkan informasi, membuat catatan transaksi, penggolongan transaksi serta ringkasan atas peristiwa finansial menghasilkan tanggung jawab penyelenggaraan APBD baik dilaksanakan dengan sendiri ataupun dengan komputerisasi. (Masnila, 2021, hal. 26)

SAPD ditentukan untuk kebijakan Pimpinan Daerah yang menjadi komponen dalam satu gabungan dari suatu system serta tahapan tata kelola Keuangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu rangkaian prosedur baik secara manual ataupun terkomputerisasi dimulai dari pengumpulan bukti-bukti transaksi, pengikhtisaran hingga pelaporan posisi keuangan dan pengoperasian keuangan pemerintahan daerah. Pada akuntansi keuangan daerah ada beberapa tahapan seperti pembuatan identifikasi, ukuran catatan dan laporan bukti-bukti kegiatan bisnis perekonomian yang ada dalam pemerintahan daerah. (Zeny Antika et al., 2020, hal .217)

Terdapat berbagai sistem penyusunan catatan yang diterapkan pada system akuntansi keuangan daerah yang umum terbagi dari tiga prosedur yakni Single Entry, Double Entry, Triple Entry. System akuntansi keungan daerah berperan sentral untuk memberi informasi yang bersifat transparan pada aktivitas serta hasil kerja keuangan pemerintahan daerah guna memberikan fasilitas terwujudnya akuntabilitas dan transparansi publik. Kewajiban atas pelaksanaan akuntabilitas keuangan mewajibkan pemerintahan daerah dalam membenahi system penyusunan catatan dan laporan (Zeny Antika et al., 2020, hal 217)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011 tentang pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan pada Pasal 4 menjelaskan bahwa sistem akuntansi pada pemerintahan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang tata kelola finansil daerah dan ketentuan tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah dikelola dalam kebijakan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Pemerintah Republik Indonesia, 2019, PMK Pasal 4)

Dari beberapa pengertian yang dipaparkan diatas, sehingga disimpulkan bahwasanya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sitem akuntansi yang terbagi atas beberapa perangkat peraturan, prosedur serta standar yang memperoleh pelaporan finansil yang handal, sesuai, akurat, serta sesuai waktunya guna memberi informasi yang berbentuk

pelaporan keuangan yang dapat dipergunakan dari pihak bagian dalam ataupun luar pemerintahan daerah untuk pengambilan keputusan kebijakan perekonomian.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilakukan dari pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) terdapat suatu tugas pengelola keuangan daerah (SKPD). Sistem akuntansi pada suatu instansi publik atau organisasi perangkat daerah (OPD) dilaksanakan penatausahaan keuangan (PPK). (Masnila, 2021, hal. 27)

Terdapat dua pendekatan dasar dalam akuntansi yakni berbasis akrual serta kas. Berbasis kas yaitu suatu konsep penyusunan catatan dimana kegiatan bisnis terjadi ketika alat pembayaran murni didapat dan diberikan. Sementara berbasis akrual yaitu penyusunan catatan kegiatan bisnis meski alat pembayaran belum benar diterima atau dikeluarkan, peristiwa tersebut terjadi tanpa melihat kas ataupun sama dengan pembayaran kas. (Harmain, 2019, hal. 8)

Akuntansi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencakup tahapan akuntansi yang terbagi dalam beberapa tahap yakni dengan sistem sendiri ataupun dengan komputerisasi, dimulai dengan penyusunan catatan, golongan hingga ringkasan kegiatan bisnis ataupun fenomena finansial juga laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan APBD dari SKPD.

Sistem akuntansi terbagi atas teknik dan pencatatan yang dibuat guna melakukan identifikasi, pengumpulan, analisis, pengelompokan, catatan, dan laporan segala transaksi pada suatu instansi dalam menerapkan pertanggungjawaban aktiva dan kewajiban. Standar Profesional Akuntansi menjelaskan terdapat beberapa yang memungkinkan terselenggaranya sistem akuntansi yang efektif yaitu:

- 1) Pengidentifikasi dan pencatatan segala transaksi yang baik.
- 2) Transaksi yang waktunya tepat dan terperinci hingga memberikan kemungkinan pengelompokan transaksi yang seharusnya untuk laporan keuangan.
- 3) Pengukuran nilai transaksi menggunakan langkah memberi kemungkinan pencatat nilai uang yang wajar untuk pelaporan.
- 4) Menetapkan waktu adanya kegiatan bisnis dalam memberi kemungkinan catatan terhadap waktu akuntansi yang seharusnya.

- 5) Penyajian dengan seharusnya transaksi dan pengungkapan pada laporan keuangan.  
(Kamila, 2015, hal. 21-22)

Secara garis besar sistem akuntansi pemerintah daerah memiliki prosedur akuntansi pemerintahan meliputi :

1) **Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas**

Pada dasarnya transaksi pendapatan yang ada pada wilayah SKPD berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pada PAD yang sah

Dokumen sumber yang dipakai sebagai landasan pencatatan transaksi penerimaan kas meliputi:

1. Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
2. Surat ketetapan retribusi (SKR)
3. Surat tanda setoran (STS)
4. Bukti transfer
5. Nota kredit bank

2) **Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas**

Prosedur ini mencakup akuntansi pengeluaran kas mencakup akuntansi untuk belanja melalui proses Uang Persediaan (UP) atau Ganti Uang (GU) atau Tambah Uang (TU) dan Belanja Langsung dimana bendahara pada pengeluaran menerima kas untuk pengeluaran atas belanja tersebut.

Dokumen sumber yang dipakai sebagai landasan dalam pencatatan transaksi pengeluaran kas (pengeluaran kas belanja) meliputi:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
3. Surat Perintah Membayar (SPM)
4. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

6. Bukti Transfer
  7. Nota Debet Bank
  8. Bukti Pengesahan SPJ
- 3) Prosedur Akuntansi Transaksi Kas Lainnya

Prosedur ini mencakup berbagai proses, baik yang masih menggunakan system manual maupun sudah terkomputerisasi, dimulai dari pencatatan, penggolongan, hingga pada ringkasan transaksi atau peristiwa finansial yang berhubungan pada perolehan kas kecuali penghasilan, pengeluaran kas dan perbelanjaan SKPD.

Dokumen sumber yang dipakai dalam pencatatan ini meliputi:

1. Surat Perintah Pencairan Dana
2. Bukti Memorial
3. Nota Debit Bank
4. Bukti Pengeluaran Lainnya
5. Bukti Potongan
6. Nota Kredit Bank



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

#### 4) Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur ini mencakup tentang penerimaan penghasilan tanpa jalan dari bendaharanya penerimaan dan juga pengeluaran, perbaikan atas kesalahan penyusunan catatan dan pergantian pengelompokkan akun.

Dokumen sumber yang dipakai sebagai landasan catatan ini meliputi:

1. Surat Penyediaan Dana
2. Surat Perintah Membayar
3. Surat Ketetapan Pajak Daerah
4. Surat Ketetapan Retribusi
5. Surat Perintah Pencairan Dana
6. Bukti Transfer
7. Nota Debet Bank
8. Nota Kredit Bank
9. Surat Tanda Setoran
10. Berita acara serah terima barang atau jasa
11. Kontrak perjanjian dengan pihak ketiga
12. Bukti memorial
13. Bukti transaksi lainnya.

#### 5) Prosedur Akuntansi Aset

Aset tetap pada suatu SKPD pada umumnya terdiri dari:

1. Aset Lancar (Current Asset) yang meliputi: kas, piutang dan persediaan
2. Aset Tidak Lancar (Non-Current Asset) yang umumnya terbagi atas aset tetap dan aset lain.

Dokumen sumber yang dipakai dalam akuntansi aset meliputi:

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah
2. Surat Ketetapan Retribusi
3. Berita acara
4. Bukti memorial
5. Bukti Lainnya.

#### 6) Prosedur Akuntansi Kewajiban

Pada umumnya kewajiban atau utang yang muncul pada transaksi SKPD yaitu komitmen berjangka pendek berbentuk hutang dengan pemotongan pajak dan juga pada pihak tiga yang bersumber oleh pengadaan jasa/barang.

#### 7) Prosedur Akuntansi Koreksi Transaksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja

SKPD yang baik dalam mengembalikan penghasilan ada pada waktu berjalan ataupun lalu yang sifatnya tidak diulang namun ada pada waktu tertentu berlangsung. Selain itu mengakibatkan perolehan ulang perbelanjaan yang ada di waktu penganggaran berlangsung dicatatkan dengan mengurangi perbelanjaan dan pada waktu lalu yang dicatatkan untuk pendapatan penghasilan dan pelaporan finansial yang telah dikeluarkan. (Masnila, 2021, hal. 27-30)

## 2. Sistem Akuntansi Dalam Perspektif Islam

Pencatatan transaksi pada sebuah institusi pemerintahan ataupun perusahaan sektor swasta yang berhubungan dengan pembuatan susunan beberapa pelaporan secara berkala diharuskan berdasarkan pada prinsip agama Islam. Selain itu memiliki sifat khusus dan juga umum dapat menyajikan informasi yang berguna bila system keuangan yang digunakan sudah sepenuhnya maksimal.

Sistem akuntansi pada konteks syariah diartikan dengan sekumpulan beberapa dasar hukum yang stabil, didapat melalui berbagai sumber ajaran agama berupa dari proses analisa, ukuran serta penjelasan sebagai landasan untuk menerangkan suatu fenomena. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ<sup>٢</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>٣</sup> وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَلَا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوهَا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ  
بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :” Wahai orang-orang yang beriman! Kamu harus mencatat semua hutang yang Anda keluarkan untuk jangka waktu tertentu. Sekarang biarkan salah satu dari Anda yang adalah penulis menuliskannya dengan benar. Penulis tidak perlu ragu untuk merekamnya karena Allah telah mengajarkannya untuk melakukannya. Debitur harus memutuskan, dan dia harus menghormati Tuhannya Allah dengan tidak mengambil apapun. Jika debitur buta huruf, lemah (karena kondisinya), atau tidak mampu mendikte untuk dirinya sendiri, biarkan walinya melakukannya. Kemudian kumpulkan dua orang untuk menjadi saksi. Jika tidak ada dua saksi laki-laki, maka anda boleh memilih satu laki-laki dan dua perempuan di antara saksi-saksi yang ada agar jika yang satu lupa, yang lain akan mengingatkannya. Juga, saksi tidak boleh keberatan ketika dipanggil. Juga, tetaplah menulis karena ada batasan waktu, terlepas dari seberapa besar atau kecilnya kewajiban itu. Kecuali jika itu adalah transaksi tunai yang dilakukan antara Anda, dalam hal ini tidak ada dosa bagi Anda jika Anda tidak meletakkannya, itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat memperkuat saksi, dan lebih dekat dengan Anda. tidak diragukan lagi. Saat Anda membeli dan menjual, sertakan saksi, dan jangan mempersulit penulis atau saksi juga. Jika Anda bertindak sedemikian rupa, tidak diragukan lagi itu adalah tindakan jahat Anda. Dan bertakwalah kepada Allah karena Allah adalah gurumu dan mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran pada setiap orang yang memiliki iman guna melaksanakan catatan transaksi muamalah tidak secara tunai sesama lainnya berupa utang dan lainnya. Selain itu wajib dijalankan dari pakar tertulis yang mempunyai kejujuran dan keadilan tersendiri. Seorang juru tulis yang jujur dan adil pada ayat diatas memberikan isyarat bagi profesi akuntan. (Siregar, 2013, hal. 2)

Pada zaman modern seperti sekarang, segala transaksi baik itu secara tunai atau non tunai wajib dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Transaksi yang menghasikan kegiatan utang harus ditulis atau dicatatkan sebab memungkinkan adanya selisih di kemudian hari. (Siregar, 2013, hal. 3)

Dari Al-Baqarah ayat 282 dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu mengenai keuangan dan pengelolaannya hendaklah dicatat dan harus terdapat keakuratan dalam laporan keuangannya. Suatu instansi pemerintahan yang baik adalah instansi yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat pada tingkatan pusat dan juga daerah serta wajib dibuat dengan keterbukaan informasi akuntansi dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Ayat tersebut juga mengandung makna terhadap adanya kehati-hatian serta mencegah terhadap perilaku curang dan keliru untuk kegiatan bisnis atau bermuamalah. (Onsardi et al., 2019, hal. 253)

Selain itu, terdapat ayat yang lain di dalam Al-Qur'an mengenai konsep akuntabilitas dalam akuntansi. Konsep akuntabilitas dalam perspektif Islam terdapat dalam Q.S An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sungguh Allah memintamu menyampaikan amanah bagi seseorang yang mempunyai hak mendapatkannya, dan jika dirimu menentukan hukum dai manusia hendaklah dirimu menentukannya secara adil. Sungguh Allah sebenar-benarnya yang memberikan pengajaran padamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*

Kaitan antar surah An-Nisa' dengan konsep akuntabilitas yakni ada di konsep dasar. Dalam ayat itu juga disampaikan bahwa setiap orang yang diembankan suatu tugas maka wajib untuk memberi tugas tersebut pada seseorang yang memiliki hak mendapatkannya. Sama halnya dengan konsep akuntabilitas, dimana pada umumnya yaitu bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberi. Seseorang akuntan publik jika telah diberi amanah untuk mengelola keuangan pemerintahan, wajib baginya menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggungjawab. (Onsardi et al, 2019, hal. 252)

Seorang akuntan juga akan diminta pertanggungjawabannya atas laporan keuangan yang telah dia kerjakan. Konsep pertanggungjawaban terdapat dalam Q.S Al- Zalzalah ayat 7-8 yaitu: “Oleh karena itu, siapa saja yang berbuat baik seperti berat atom pastinya memperhatikannya dan menanggungnya, dan siapa saja yang berbuat jahat demikian pastinya menyadarinya (balasan)”. Makna arti ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang pasti akan ditanyakan perihal pertanggungjawaban manusia terhadap sesuatu yang sudah



dibuat semasa hidup di dunia. Dan manusia mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nya dihadapan Allah kelak di akhirat. Sama halnya dengan profesi akuntan, seorang akuntan publik dapat dimintai tanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah dilakukan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan. (Onsardi et al., 2019, hal. 254)

Pemerintah daerah juga diamanahkan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh lingkungan sekitar yang disebut dengan kepemilikan umum atau aset. Barang milik bersama (al-amwal al-'ammah) yaitu kekayaan yang bukan termasuk kepemilikan perseorangan tetapi kekayaan yang digunakan untuk keperluan orang banyak dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat umum. Dan kekayaan ini haruslah dijaga oleh pihak yang berwenang sebagai pemegang amanah rakyat. (Harahap, 2015, hal. 29)

### **3. Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**

#### **a. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah**

Jasa akuntansi di lembaga pemerintahan sangat diperlukan untuk menghasilkan informasi keuangan dan sebagai peningkatan mutu pengawasan di lembaga pemerintah. Akuntansi bidang publik yaitu sistem metode dan analisa akuntansi yang digunakan terhadap tata kelola dana publik pada kelembagaan tertinggi negara dan bagian turunannya, pemerintahan daerah, BUMN dan setaranya bahkan terhadap proyek tugas bersama bidang publik dan swasta (Susanti, 2020, hal. 2)

Akuntansi keuangan daerah yaitu sebuah tahapan perlakuan identifikasi pencatatan, ukuran, serta laporan kegiatan bisnis keuangan perekonomian menurut suatu instansi pemerintahan setempat yang disusun menjadi suatu bentuk data sebagai bentuk mengambil kebijakan dari pihak eksternal pemerintahan yang membutuhkan. (Susanti, 2020, hal. 3)

#### **b. Tujuan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**

Pada dasarnya terdapat kesamaan antara tujuan akuntansi pemerintahan dengan akuntansi bisnis, yaitu memberikan segala informasi mengenai keuangan atas transaksi yang terjadi pada suatu organisasi tersebut dan pada periode tertentu. Berhubungan dengan hal demikian, ada terdapat tujuan tentang akuntansi pemerintahan secara khusus memiliki sebagai berikut :

1) Akuntabilitas

Karena setiap manajer atau manajemen harus mampu menggambarkan pertanggungjawaban keuangan ketika menyampaikan laporan keuangan pemerintah, tujuan utama pertanggungjawaban ditonjolkan.

2) Manajerial

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan inisiatif pembangunan lainnya dapat dilakukan dengan bantuan akuntansi pemerintah, yang juga memungkinkan pemerintah dalam berkegiatan membangun dan mengendalikan terhadap rangkaian aktivitas pemerintahan dalam mencapai ketepatan terhadap aturan atau kebijakan perundang-undangan, efisiensi dan efektifitas dibutuhkan manajerial yang baik.

3) Pengawasan

Akuntansi pemerintah diterapkan agar dapat dilakukan fungsi pengecekan pengurus keuangan Negara dengan dapat dengan sederhana dari aparatur pemeriksa. (Susanti, 2020, hal. 13-14)

**c. Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah**

Akuntansi pemerintahan mempunyai karakter dan sifat sendiri dari pada dengan akuntansi bisnis. Terdapat berbagai karakter tersebut sebagai berikut:

1) Tidak berorientasi pada laba

Instansi pemerintahan tidak mencatat laba pada laporan keuangannya. Hal ini dikarenakan pendapatan secara keseluruhan yang diterima oleh kas pemerintahan berasal dari penerimaan Negara yang bersifat memaksa, seperti pajak, atau dari jenis penghasilan lain yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

2) Kepemilikan pemerintah bersifat kolektif oleh konsituen

Gagasan utamanya di sini adalah bahwa kepemilikan pemerintah sulit untuk dialihkan. Jika kinerja kepemilikan ini di bawah standar, proses yang berlarut-larut harus diikuti sebelum dapat memberikan umpan balik kepada pemerintah.

3) Peran keuangan tidak berhubungan langsung pada layanan

Hal penting yang harus diingat adalah semua orang di Indonesia bisa menggunakan fasilitas umum, bukan hanya mereka yang membayar pajak.

- 4) Ketetapan peraturan dan pembuatan operasional dari lembaga perwakilan Negara Memiliki latar belakang yang bervariasi, namun penting untuk menekankan mereka ketika membuat kebijakan atau keputusan tentang berbagai topik di mana keahlian mereka mungkin kurang.
- 5) Keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka  
Dalam mengatasi adanya tindakan korupsi dan nepotisme, catatan akuntansi pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan harus dicatat secara terbuka sehingga setiap orang dapat memeriksa dan menyaksikannya tanpa batas.
- 6) Pemakaian lebih dari satu jenis dana  
Penggunaan dana bagi sebuah aktivitas program pemerintahan bersumber oleh beberapa sumber penerimaan kas negara.
- 7) Akuntansi pemerintahan bersifat kaku  
Akuntansi pemerintah ketat dalam arti bahwa tidak ada yang dapat ditambahkan atau ditarik darinya karena sangat terkait erat dengan hukum dan peraturan.  
(Susanti, 2020, hal. 14-16)

Terdapat berbagai karakter dan sifat akuntansi pemerintah dengan berikut:

- 1) Beda pada akuntansi bisnis
- 2) Tidak adanya pelaporan untung
- 3) Menerapkan dana lebih dari satu
- 4) Tergantung oleh perundang-undangan
- 5) Tidak mengetahui prediksi penahanan laba dan modal dalam laporan neraca. (Susanti, 2020, hal. 16-17)

#### **d. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**

##### 1) Sistem Pencatatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 ayat 3 menjelaskan bahwasanya secara dasar kegiatan bisnis perekonomian yaitu rangkaian kegiatan yang berkaitan pada uang. Pembuatan ukuran terhadap kegiatan perekonomian menerapkan satuan uang, sehingga segala kegiatan bisnis akuntansi seharusnya dikatakan dengan satuan tersebut.

Terdapat macam-macam sistem pencatatan akuntansi pemerintah, yaitu:

### 1. Single Entry

Istilah "Single Entry" juga sering digunakan untuk menjelaskan metode pencatatan entri tunggal. Transaksi ekonomi dicatat dalam sistem ini hanya dengan satu kali pencatatan. Bagian penerimaan akan diterapkan dalam mencatat transaksi yang menambah kas, sedangkan bagian pengeluaran akan diterapkan dalam mencatat transaksi yang mengurangi kas.

### 2. Double Entry

Pencatatan double entry juga dikenal dengan penjurnalan. Pada pencatatan double entry terdapat bagian debit dan kredit.

### 3. Triple Entry

Triple entry merupakan pembuatan catatan dalam buku anggaran serta catatan menerapkan pendekatan double entry. Sedangkan penyusunan catatan di buku anggaran dibuat bagi pembuatan pelaporan implementasi anggaran dan penyesuaian anggaran, sistem double entry digunakan untuk mencatat transaksi dalam penyusunan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan Arus kas.. (Susanti, 2020, hal. 21-22)

## 2) Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan terdapat tiga dasar atau basis akuntansi keuangan pemerintahan daerah yaitu:

### 1. Basis Kas

Ketika kas ataupun setara kas diperoleh ataupun dibayarkan, berbasis akuntansi yang dikenal sebagai basis kas memperhitungkan dampak tersebut.

### 2. Basis Kas Menuju Akrua

Basis akuntansi yang dikenal sebagai "cash-to-accrual" mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berbasis kas sementara secara akrual mengakui aset, utang, dan dana ekuitas.

### 3. Basis Akrua

Terlepas dari kas atau setara kas diperoleh ataupun dibayarkan, dasar akuntansi akrual mengakui hubungan antara transaksi dan peristiwa lain segera setelah terjadi. (Republik Indonesia, 2013, hal. 2-3)

#### **4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah PP NO. 71 Tahun 2010**

Kualitas pada laporan keuangan Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 20110 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut merupakan suatu ukuran yang bersifat normatif yang harus diciptakan pada informasi akuntansi sehingga instansi pemerintahan bisa mencapai sasarnya. Ada terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah yang mencakup:

##### **a. Relevan**

Jika informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna menganalisis fenomena di waktu sebelumnya maupun terkini, mengantisipasi masa depan, dan memvalidasi serta mengevaluasi hasil evaluasi mereka di masa lalu, maka pengetahuan tersebut dapat berdampak pada kebijakan pengguna. Akibatnya, informasi dalam laporan keuangan yang relevan bergantung pada bagaimana informasi itu akan digunakan. Informasi dianggap relevan jika:

##### **1) Mempunyai manfaat umpan balik (feedback value)**

Pengguna harus dapat mengkonfirmasi atau menilai peristiwa sejarah menggunakan informasi tersebut.

##### **2) Mempunyai manfaat prediktif**

Berdasarkan kinerja historis dan keadaan saat ini, informasi dalam laporan keuangan bisa memudahkan pengguna untuk membuat prediksi tentang masa depan.

##### **3) Tepat waktu**

Informasi laporan keuangan disampaikan dengan segera hingga bisa berdampak dan membantu untuk mengambil keputusan.

##### **4) Lengkap**

Semua data akuntansi bisa memberi pengaruh mengambil keputusan yang berfokus terhadap isu-isu terkini harus disertakan dalam penyajian

informasi akuntansi keuangan pemerintah. Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan informasi akuntansi, maka informasi tersebut harus disajikan dengan jelas.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## **b. Andal**

Informasi laporan keuangan harus dapat diverifikasi, bebas dari salah tafsir dan ketidakakuratan besar, dan memberikan semua fakta insiden yang relevan secara jujur. Jika penyajian laporan keuangan tidak dapat diandalkan maka dapat dipastikan laporan keuangan tersebut keliru. Informasi dapat dikatakan andal jika memenuhi karakteristik berikut:

### 1) Penyajian jujur

Kegiatan bisnis atau fenomena lain yang dimaksudkan untuk tersajikan oleh informasi ataupun dengan normal diantisipasi harus dijelaskan secara akurat.

### 2) Dapat diverifikasi

Informasi laporan keuangan harus dapat diverifikasi, dan jika uji diulangi oleh pihak yang berbeda lebih dari satu kali, temuan tidak boleh berbeda secara signifikan.

### 3) Netralitas

Informasi tidak dapat diberikan untuk memajukan kepentingan pihak tertentu; itu harus disajikan untuk kepentingan umum.

## **c. Dapat Dibandingkan**

Jika informasi pelaporan bisa diperbandingkan pada laporan dari periode lalu ataupun organisasi pelaporan lainnya secara umum, informasi tersebut akan jauh lebih relevan. Hanya jika suatu entitas menggunakan prinsip akuntansi yang konsisten di seluruh periode pelaporan, perbandingan internal bisa dilaksanakan. Apabila instansi yang dibandingkan menerapkan peraturan akuntansi yang serupa, yang dibandingkan pada eksternal bisa dilaksanakan. Perubahan dapat diberitahukan pada periode terjadinya jika badan pemerintah mengadopsi kebijakan akuntansi yang lebih unggul dari prinsip akuntansi saat ini.

#### **d. Dapat Dipahami**

Pemakai harus bisa mengerti informasi yang ditawarkan pada pelaporan finansial, serta informasi tersebut harus dinyatakan dengan cara dan berbahasa yang sesuai pada tingkatan pengetahuannya. Maka dari itu, pemakai dianggap mempunyai kesadaran relevan terhadap operasional dan lembaga pelapor serta kemauan untuk memahami informasi yang relevan. (Masnila, 2021, hal. 17-19)

### **5. Laporan Keuangan Pemerintah daerah**

#### **a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan disusun mempunyai tujuan tertentu. Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa penyusunan laporan keuangan dalam menyajikan informasi yang sesuai menyangkut status finansial serta segala kegiatan bisnis yang dilakukan dari sebuah instansi laporan pada periode laporan dibuat.

Laporan keuangan adalah pembuatan sajian yang distrukturkan oleh status keuangan dan juga hasil kerja pada sebuah institusi. Laporan tersebut memberi gambaran mengenai posisi keuangan secara jelas dalam memberikan informasi perihal kondisi keuangan dan berguna dalam pengambilan kebijakan ekonomi dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola keuangan atas pemakaian anggaran yang telah diamanahkan. (Marliyah, 2021, hal. 45)

Entitas pelaporan yaitu divisi administrasi pemerintahan yang terbagi atas satu bahkan lebih instansi akuntansi. Sesuai dengan kebijakan undang-undang, entitas pelaporan harus menyampaikan pelaporan keuangan tanggung jawab dalam bentuk pelaporan dengan tujuan yang umum, yang terbagi dalam kategori berikut:

- 1) Pemerintahan pusat
- 2) Pemerintahan daerah
- 3) Setiap kementerian atau lembaga di sekitar pemerintahan pusat
- 4) Satuan organisasi di sekitar pemerintahan pusat serta daerah ataupun organisasi lain. (Fauziah, 2018, hal. 24)

Laporan keuangan pemerintah daerah dibuat guna mencukupi keperluan informasi dari segala kelompok pengguna. Beberapa kelompok umum pemakai laporan keuangan pemerintah, tetapi tidak ada batasan yaitu sebagai berikut:



- 1) Masyarakat
- 2) Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
- 3) Pihak yang berperan atau memberikan kontribusi dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
- 4) Pemerintah. (Masnila, 2021, hal. 6)

**b. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan pemerintahan sudah harus memberi penyajian informasi yang bermanfaat untuk pemakai laporan keuangan dan memiliki nilai akuntansi serta menghasilkan suatu kebijakan terutama kebijakan mengenai sosial, perekonomian, ataupun politik. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan informasi tentang:

- 1) Kenali sumber, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan.
- 2) Pendapatan periode berjalan cukup untuk menutup semua jenis pengeluaran.
- 3) Kuantitas sumber daya yang digunakan oleh pemerintah dan pencapaian tujuan.
- 4) Memastikan bahwa bisnis pelapor mampu mendanai semua operasinya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 5) Perubahan posisi keuangan entitas pelapor, apakah terjadi peningkatan ataupun menurun yang menjadi akibat dari operasi yang direncanakan saat periode berjalan.
- 5) Posisi serta situasi keuangan entitas pelapor yang dihubungkan pada sumber pendapatan berjangka pendek maupun panjang. (Djanegara, 2017, hal. 2)

Laporan keuangan disusun dalam memberi data yang sesuai mengenai situasi finansial entitas pelapor dan seluruh transaksinya yang ada saat periode berjalan. Berikut adalah tujuan laporan keuangan pemerintah daerah:

1) Media transparansi

Masyarakat memiliki hak atas pengetahuan yang penuh dan terbuka sebagai sarana meminta pertanggungjawaban pemerintah sebagai pengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan sebagai sarana untuk mematuhi hukum. Laporan keuangan pemerintah berguna sebagai wahana transparansi karena memungkinkan masyarakat menerima informasi keuangan yang jujur dan terbuka atas program-program pemerintah.

## 2) Media akuntabilitas publik

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi sebagai pemenuhan hak rakyat, khususnya hak untuk mengetahui, hak untuk mendapat informasi, dan hak untuk didengar.

## 3) Sarana informasi

Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai sumber data untuk melacak kinerja dan kepatuhan hukum dan peraturan, serta untuk menentukan dan memperkirakan kondisi dan status ekonomi pemerintah, serta beberapa perubahan yang telah dan akan terjadi.

## 4) Sarana evaluasi kinerja

Laporan keuangan dapat digunakan untuk menilai kinerja dengan beberapa cara, antara lain:

1. Tentukan biaya, tugas, dan komponen program untuk memberi kemudahan analisa dan membandingkan dengan standar yang ditentukan;
2. Melakukan perbandingan kinerja dengan periode sebelumnya. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana laporan keuangan bisa diterapkan dalam menilai pemakaian sumber daya perekonomian yang diatur dari pemerintahan untuk memperoleh target yang disusun.
3. Mengevaluai tingkat ekonomi, efektivitas operasi, program, efisiensi serta aktivitas pemerintah
4. Mengevaluai hasil dari program serta keefektifitas terhadap pencapaian target
5. Mengevaluai tingkat pemerataan dan keadilan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/>

Laporan keuangan pemerintah biasanya digunakan untuk memeriksa situasi keuangan, mengidentifikasi nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk menjalankan operasi pemerintah, dan menilai kemandirian dan efisiensi entitas pelapor. Pemerintah pusat mengembangkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan semua jenis laporan keuangan sebagai cara mewujudkan tata kelola, lebih mempertanggungjawabkan keuangan negara, dan menyajikan informasi yang lebih komprehensif. Sebagai hasil dari undang-undang dan peraturan yang mengatur keuangan publik, basis akrual telah dipraktikkan sejak 2015.

### c. **Komponen Laporan Keuangan SKPD**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang penyajian laporan keuangan. Komponen yang tercakup dalam laporan keuangan pemerintahan terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
- 3) Neraca
- 4) Laporan Operasional (LO)
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (Masnila, 2021, hal. 43)

Setiap entitas pelapor menyajikan bagian penyusun laporan keuangan, terkecuali:

- 1) Laporan arus kas yang hanya disediakan oleh organisasi dengan peran treasury umum.
- 2) Hanya bendahara umum Negara dan badan pelaporan yang membuat laporan keuangan gabungan yang diizinkan untuk menyajikan laporan perubahan saldo anggaran. (Masnila, 2021, hal. 44)

Adapun uraian lanjutan mengenai berbagai komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintahan:

#### 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan sumber, alokasi yang mendiskripsikan perbedaan dari anggaran dan realisasi anggaran saat waktu pengajuan laporan.

Beberapa unsur yang ada di dalam laporan realisasi anggaran yaitu:

1. LRA-Penerimaan, atau pendapatan dari bendahara umum negara, bendahara umum daerah, atau badan pemerintahan lain yang akan menambahkan jumlah kas anggaran pertahun berjalan dan yang dimiliki pemerintahan serta tidak wajib dibayarkan lagi.
2. Pengeluaran, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara umum negara atau daerah yang dapat mengurus dana pemerintah dalam

tahun anggaran berjalan dan yang tidak dapat dikembalikan kepada pemerintah.

3. Perpindahan yang meliputi dana perimbangan dan dana bagi hasil adalah penerimaan pendapatan atau pembayaran uang oleh satu entitas pelapor ke bisnis pelapor lainnya.
4. Pembiayaan yaitu masing-masing penghasilan ataupun pengeluaran yang tidak mengurangi nilai bersih suatu entitas dan yang harus dibayar kembali atau yang tidak akan didapatkan ulang, baik di tahun anggaran masa sekarang ataupun masa-masa yang akan datang.

## 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran memberikan rincian lebih lanjut mengenai naik atau turunnya saldo anggaran dari tahun sebelumnya ke tahun pelaporan.

## 3) Neraca

Aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pelapor dijelaskan dalam neraca pada tanggal tertentu.

Beberapa unsur yang termuat dalam neraca yaitu sebagai berikut:

1. Aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah meliputi sumber daya non keuangan yang pelayanannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum serta sumber daya peninggalan sejarah dan budaya. Sumber daya ini digunakan dari pemerintahan atau publik dan bisa dilakukan pengukuran dengan satuan uang. Yaitu kekayaan di waktu lalu dengan kegunaan perekonomian serta sosial yang diharapkan di waktu mendatang.
2. Kewajiban adalah hutang yang berasal melalui kejadian sebelumnya dan pelunasannya menguras sumber keuangan pemerintahan.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintahan yang ditentukan dengan cara mengurangkan kewajibannya dari kekayaannya.

## 4) Laporan Operasional

Pemerintah pusat atau pemerintah daerah memantau penggunaan sumber daya ekonomi yang meningkatkan pemerataan dalam laporan operasional yang

mencakup pelaksanaan program pemerintah dalam periode pelaporan tertentu. Komponen laporan operasional adalah dengan berikut:

1. Pendapatan laporan operasional
  2. Beban
  3. Transfer
  4. Pos luar biasa
- 5) Laporan Arus Kas

Menyajikan data kas yang berkaitan pada kegiatan operasional, penanaman modal, dana yang mendeskripsikan saldo pertama, pemasukan pada pemerintahan pusat atau daerah pada satu periode pelaporan.

- 6) Laporan Perubahan Ekuitas

Memberi data mengenai peningkatan dan juga ekuitas yang menurun dari tahun sebelumnya ke tahun laporan terbaru.

- 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas semuanya termasuk penjelasan numerik atau data dalam CaLK. Untuk mencapai penyajian laporan keuangan yang wajar, CaLK juga menyediakan informasi tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan pelapor dan informasi yang harus dicantumkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Unsur-unsur yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

1. Menampilkan data secara umumnya mengenai materi laporan dan akuntansi.
2. Menampilkan data mengenai peraturan fiscal dan perekonomian macro.
3. Menampilkan pengikhtisaran perolehan tujuan atau sasaran finansial saat tahun laporan serta penjelasan perihal kendala yang dialami.
4. Menampilkan data mengenai landasan susunan pelaporan finansial juga peraturan akuntansi yang digunakan terhadap kegiatan penting lain.
5. Menampilkan informasi lengkap setiap pos terhadap lembaran awal pelaporan finansial.

6. Menampilkan data yang diwajibkan dari PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang tidak dijelaskan pada lembaran awal laporannya.
7. Menampilkan data lain yang dibutuhkan dalam tampilan secara baik, yang tidak tersajikan pada lembaran awal laporannya. (Djanegara, 2017, pp. 2-12)

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang sesuai dengan riset ini yang bisa sebagai tinjauan pustaka yakni dengan berikut:

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sophia Molinda Kakisina (2020)	Analisis penerapan sistem akuntansi pemerintah pada kantor camat Kecamatan Gunungsitoli Utara	Metode analisis deskriptif	Hasil temuan menampilkan pada kantor camat Kecamatan Gunungsitoli Utara belum maksimal karena belum adanya penyesuaian untuk penusutan aset tetap.
2	Redian Mulyadita (2021)	Analisa penerapan system akuntansi keuangan daerah pada dinas pendapatan daerah	Metode analisis deskriptif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah belum cukup

		Kabupaten Kuantan Singingi		memandu penerapan sistem akuntansi keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3	Edwin Pratama Setiono (2019)	Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah dan system informasi akuntansi keuangan daerah	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berdampak positif meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah dan kualitas akuntansi keuangan daerah.
4	Hilal Hafid dan Sari Maulida Vonna (2022)	Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan pada kantor Camat Kuala Pesisir	Metode analisis deskriptif	Hasil temuan menampilkan bahwasanya penggunaan standar akuntansi pemerintahan pada kantor Camat Kuala Pesisir belum benar-benar diterapkan secara optimal.

5	Ranti Sri Wulandari (2021)	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Camat Kuantar Tengah	Metode deskriptif komparatif	Berdasarkan temuan kajian tersebut, pihak Camat Kuntan Tengah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAP N0.01 tentang penyajiannya dalam PP No 71 Tahun 2010 tentang SAP.
6	Febransyah dan Dinda Astari (2021)	Analisis Tingkat Pemahaman Akuntansi Berbasis Akruwal Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kantor Camat Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir	Metode analisis kualitatif	Menurut temuan penelitian, formalitas tercermin dengan baik dalam seberapa baik orang memahami bagaimana menggunakan kriteria akuntansi pemerintahan dengan basis akruwal.
7	Ade Husna, dkk (2022)	Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi	Metode kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaan keuangan berpengaruh



		Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD Kabupaten Aceh Besar		signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kabupaten Aceh Besar.
8	Zeny Antika, dkk (2020)	Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Metode Kuantitatif	Studi ini menunjukkan bagaimana pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara signifikan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
9	Onsardi, dkk (2020)	Accountability In The Management of Village Fund From The Islam Perspective (A Case Stud Of	Metode kualitatif deskriptif	Menurut temuan penelitian, syariat yang dianut di Desa Taba Padang Rejang Kec. Hulu Palik Kab. Bengkulu Utara dalam hal

		Taba Padang Rejang Village Huku Palik District North Bengkulu Regency)		tanggung jawab pengelolaan uang desa.
10	Suryanto (2018)	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 yang mengacu pada SAP.

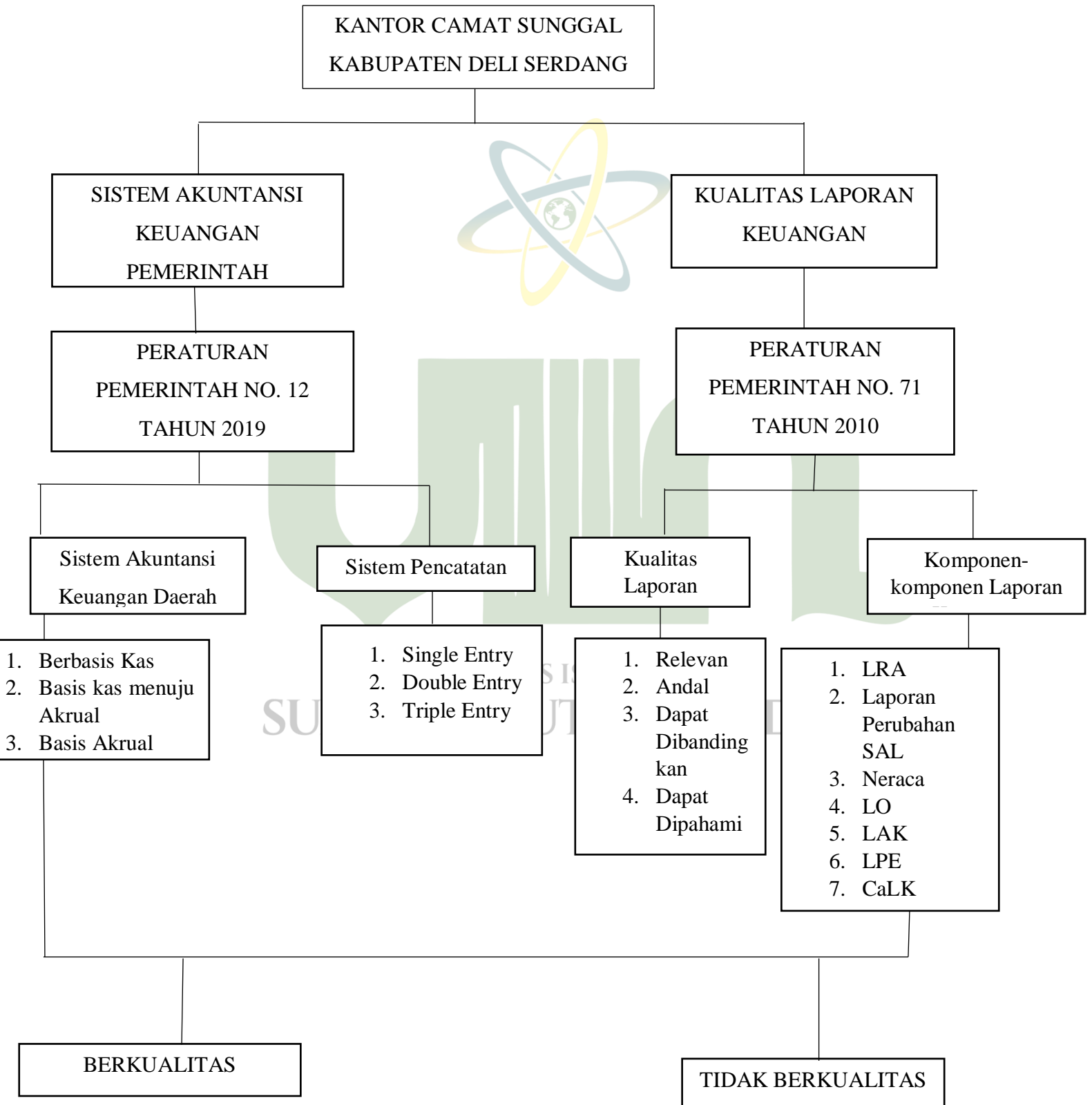
### C. Kerangka Penelitian

Kerangka konsep penelitian adalah abstraksi atau gambaran dari suatu kenyataan sehingga dapat dikomunikasikan dan terbentuk suatu teori yang mendeskripsikan hubungan antar variabel yang diteliti.

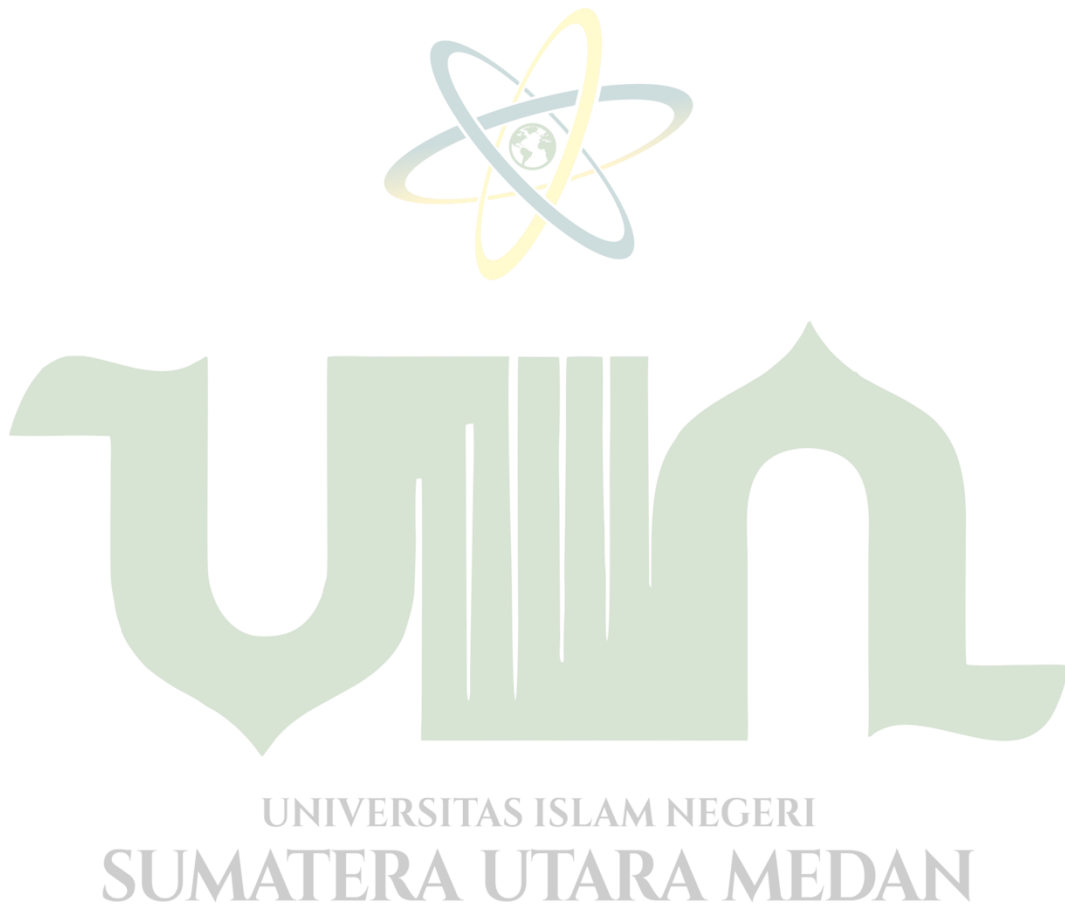
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang tampilan penggunaan system akuntansi keungan daerah untuk peningkatan mutu pelaporan finansial. Pemerintahan setempat di masa sekarang diharuskan untuk dapat menyajikan pelaporan yang bermutu dan mempunyai nilai keterbukaan maupun akuntabilitas besar dari menggunakan system yang sudah ditentukan.

Tahapan pembuatan susunan Laporan Keuangan yang dilaksanakan wajib berdasarkan pada kebijakan pemerintahan nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dari hadirnya aturan pemerintah itu diinginkan pelaporan pada sebuah tempat pemerintahan mempunyai pelaporan yang bermutu, diikuti dari hasil belajar pada tenaga kerja yang ada di pemerintahan setempat guna mampu mengerti serta menjalankan sytem yang berlaku untuk mengelola keuangan daerah dan dapat bertanggungjawab terhadap daerah tersebut.

Sedangkan untuk kualitas laporan Keuangan Pemerintah berpedoman padav Peraturan Pemerintah No.77 Tahun 2010.



*Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dari judul yang sudah dikemukakan, maka pelaksanaan penelitian ini menerapkan studi deskriptif kualitatif, dimana studi tersebut membahas mengenai berbagai hal yang mungkin dalam pemecahan permasalahan secara akurat menggunakan langkah pengumpulan data, klasifikasi data serta analisis data lalu dilakukan penyusunan guna mampu dikaji berdasarkan teori yang sesuai dan berkaitan pada permasalahan yang diteliti dan ditentukan kesimpulan berbentuk tugas akhir.

Sementara itu penggunaan pendekatan untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini adalah riset yang memperoleh berbagai temuan dan tidak bisa dicapai dari menerapkan tahapan statistika ataupun dengan pengukuran. Penelitian kualitatif memperoleh beberapa penjelasan yang lebih rinci tentang suatu tulisan, perkataan ataupun bentuk tulisan yang ditinjau berdasarkan pada individu, berkelompok, publik, ataupun suatu instansi di kondisi atau lingkup tertentu yang dibahas menurut perspektif yang bersifat keseluruhan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Penggunaan waktu pada penelitian ini yaitu pada bulan Desember 2022 – Maret 2023. Penelitian ini dilakukan pada Kecamatan Sunggal dikarenakan permasalahan yang ingin peneliti angkat berada di Kecamatan Sunggal dan alasan lain mengenai peneliti ingin meneliti di Kecamatan Sunggal karena lokasi penelitian berdekatan dengan domisili penulis sehingga hal tersebut berdampak dengan kemudahan akses untuk meneliti mengenai permasalahan yang akan diteliti.

Tabel 3. 1

## Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023									
		Bulan											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Pengajuan Judul	■											
2.	ACC Judul		■										
3.	Dapat Pembimbing Skripsi		■										
4.	Mengerjakan Proposal			■									
5.	Bimbingan Proposal				■	■							
6.	Seminar Proposal					■							
7.	Penelitian					■							
8.	Bimbingan Skripsi								■				
9.	Sidang										■		

## C. Sumber dan Jenis Data

## 1. Jenis Data

Penggunaan jenis data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

## a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat melalui hasil observasi dan wawancara langsung kepada responden. Pada penelitian ini data primernya adalah yang didapatkan melalui sumber pertama, berupa

wawancara secara langsung pada bagian keuangan yaitu Bendahara Kantor Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang kemudian data tersebut diolah sesuai kebutuhan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dengan mengumpul ataupun mengolah informasi yang berjenis dokumenter dan berupa tinjauan bahan-bahan tertulis seperti makalah pribadi, catatan resmi, kutipan, atau undang-undang yang relevan dengan subjek penelitian yang ada. Data sekunder pada penelitian ini yaitu beberapa dokumen berupa laporan keuangan yang terdapat pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

## 2. Sumber Data

Penggunaan sumber data pada penelitian ini yaitu hasil wawancara langsung dan laporan keuangan Tahun 2019-2021 Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara ialah mengumpul informasi atau data lain yang dilaksanakan dengan langkah mewawancarai langsung Bendahara Umum Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang tersebut dalam memberi serta menunjukkan data perihal penggunaan system akuntansi keuangan daerah juga berbagai kendala yang dialami untuk menambah tingkat mutu pelaporan keuangan yang terdapat pada Kantor Camat Sunggal.

Pihak-pihak yang di wawancarai pada penelitian ini adalah

- a. Ibu Nurfidayani sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Kantor Camat Sunggal.
- b. Bapak Muhammad Abdul Nasution sebagai Bendahara Pengeluaran

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan berbagai data sekunder yaitu beberapa catatan pelaporan tanggung jawab ataupun informasi berupa berkas institusi yang berhubungan pada permasalahan pokok dan riset yang dijadikan dokumen tambahan data riset yang tidak didapat dari pengamatan dan interview. Informasi yang dibutuhkan untuk riset Penggunaan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah pada Kantor Camat Sunggal sebagai berikut:

- a. Informasi tentang profil Kantor Camat Sunggal Kab. Deli Serdang yang meliputi: visi dan misi, struktur organisasi, serta gambaran umum Penerapan Sistem Akuntansi pada pihak Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
- b. Informasi mengenai data laporan keuangan yang disajikan oleh Kantor Camat Sunggal Kab. Deli serdang dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

### E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yaitu tahapan pencarian dan penyusunan tersistematis dan terperinci suatu data yang didapatkan dari prpses observasi, wawancara dan juga dokumentasi dengan cara mengelompokkan data kemudian disusun dan memilih data yang penting dsan yang tidak penting untuk dipahami, lalu membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti oleh pembaca.

Analisis data yang akan dilakukan berdasarkan tentang keterkaitan antara sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di Kecamatan Sunggal. Berikut dijelaskan keterkaitan permasalahan yang akan diteliti. Data yang akan dianalisis dari penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan pihak bendahara Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang.



Tabel 3.2  
Keterkaitan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan
Indikator adalah sekumpulan proses yang diawali dengan proses pengumpulan data dan diakhiri dengan proses pencatatan, pengelompokan, serta ikhtisar kegiatan ataupun peristiwa finansial guna memperoleh laporan yang berfungsi untuk suatu tanggung jawab terhadap penyelenggaraan APBD.	Komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.
Sistem pencatatan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yakni: Single Entry, Double Entry dan Triplee Entry	Relevan, dapat diandalkan, komparatif, dan dimengerti adalah kualitas yang berkontribusi untuk memperoleh laporan keuangan berkualitas tinggi.
Sistem akuntansi keuangan daerah terbagi menjadi cash basis, cash to accrual basis, dan accrual basis sebagai tiga basis akuntansinya.	Laporan keuangan pada SKPD disajikan untuk dijadikan media terbuka, akuntabilitas, sebagai fasilitas informasi dan sebagai tempat evaluasi hasil kerja.

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diteliti mengenai topik yang diangkat tentang penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Data yang didapat berdasarkan ketentuan tabel diatas akan dijabarkan dengan menggunakan metode analisis data. Beberapa tahap penggunaan analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Mengorganisir Data

Peneliti memperoleh data langsung dari kegiatan interview terstruktur, maksudnya data didapat dari kegiatan tanya jawab dengan memberi beberapa pertanyaan pada pihak narasumber. Kemudian, sesudah melakukan sesi kegiatan tersebut maka dibuat transkrip hasil dengan mengulang pemutaran rekaman hasil interview dan mendengar rekaman tersebut dengan seksama, selanjutnya menulis informasi yang terdapat dalam rekaman wawancara tersebut melalui kata-kata.

2. Penyederhanaan Data

Sesudah organisir data, data atau informasi yang diperoleh disederhanakan dengan memilih dan memilah data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini dapat langsung diproses pada tahap berikutnya.

3. Proses Analisis Data

Proses analisa data dikerjakan ketika pengumpuln data berjalan, serta dilakukan sesudah tuntas mengumpulkan data untuk waktu tertentu. Di waktu interview, peneliti telah harus menganalisis pada jawaban responden atau orang yang diwawancarai. Apabila ditemui jawaban yang belum sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti akan bertanya kembali hingga diperoleh data yang akurat dan kredibel.

4. Hasil interpretasi

Hasil interpretasi didapat dari hasil pemahaman coding data, selanjutnya dihubungkan pada teori yang terdapat hingga interpretasi yang diperoleh dengan sifat bias.

Penelitian ini menjelaskan mengenai penggunaan system akuntansi keuangan pemerintahan daerah yang digunakan dari Kantor Camat Sunggal. Penelitian ini menerapkan metode wawancara dengan daftar checklist. dalam mendapatkan hasil jawaban yang telah dikumpul melalui wawancara secara langsung digunakan daftar checklist untuk setiap pertanyaan wawancara. Pilihan jawaban yang disajikan dalam wawancara ini adalah Ya dan Tidak. Untuk jawaban Ya nilainya 1 dan untuk jawaban tidak nilainya 0. Dalam melakukan perhitungan persentase jawaban yang didapat digunakan Rumus Dean J.Champion sebagai berikut:

- a. 0%-25% : artinya penggunaan system akuntansi keuangan pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangannya tidak baik.
- b. 25%-50% : artinya penggunaan system akuntansi keunagan pemerintah daerah dan mutu laporan keuangannya kurang baik.
- c. 50%-75% : artinya penggunaan system akuntansi keunagan pemerintah daerah dan mutu laporan keuangannya cukup baik
- d. 75%-100%: artinya penggunaan system akuntansi keunagan pemerintah daerah dan mutu laporan keuangannya sangat baik. (Iii & Penelitian, 2018)

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Deli Serdang**

Secara geografis Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian dari daerah pantai bagian timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak pada 2° 57 Lintang Utara dan 3° 16 Lintang Selatan dan 98° 33 - 99° 27 Bujur Timur dengan luas wilayah 2.497.72 km<sup>2</sup> atau 3,34% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Deli Serdang mempunyai posisi yang amat strategis, karena berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan satu dari berbagai wilayah lintas pelayaran tersibuk di dunia. Deli serdang mempunyai sumber daya alam yang bisa dijadikan sumber pemasukan guna mendukung kemajuan perekonomian secara hakikatnya dapat memberi kontribusi bagi kemakmuran masyarakat di Deli Serdang. (Profil Deli Serdang ., hal 11.)

Wilayah Kabupaten Deli Serdang berbatasan bagian utara dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka, dan di bagian Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Dengan posisi strategis tersebut, sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi potensi yang harus terus dikembangkan dalam menghadapi persaingan yang kompetitif dalam menarik perhatian investor dalam pengembangan UMKM dan juga dalam pemasaran hasil produk atau jasa di Kabupaten Deli Serdang.

##### **2. Gambaran Umum Kecamatan Sunggal**

Kecamatan Sunggal merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Sunggal merupakan kecamatan yang diapit oleh 2 kota yaitu Kota Medan dan Kota Binjai. Luas daerah pada kecamatan Sunggal yaitu 92,52 km<sup>2</sup>. Adapun batasan-batasan wilayah disekitar Kecamatan Sunggal yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Hamparan Perak dan Kecamatan Labuhan Deli.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Medan Sunggal dan Medan Helvetia.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pancur batu dan Kecamatan Kotalimbaru.
- d. Sebelah barat berbatsan dengan Kota Binjai dan Kecamatan Kotalimbaru. (BPS Kota Medan, 2020 hal 26-27)

**Tabel 4. 1**

Nama-Nama Desa di Kecamatan Sunggal

No	Nama Desa
1.	Desa Helvetia
2.	Desa Lalang
3.	Desa Medan Krio
4.	Desa Mulyo Rejo
5.	Desa Paya Geli
6.	Desa Purwodadi
7.	Desa Puji Mulyo
8.	Desa Sei Beras Sekata
9.	Desa Mencirim
10.	Desa Sei Semayang
11.	Desa Serbajadi
12.	Desa Sukamaju
13.	Desa Sumber Melati Diski
14.	Desa Sunggal Kanan
15.	Desa Tanjung Gusta
16.	Desa Tanjung Selamat
17.	Desa Telaga Sari

Sumber : Profil Kecamatan Sunggal

### 3. Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Sunggal

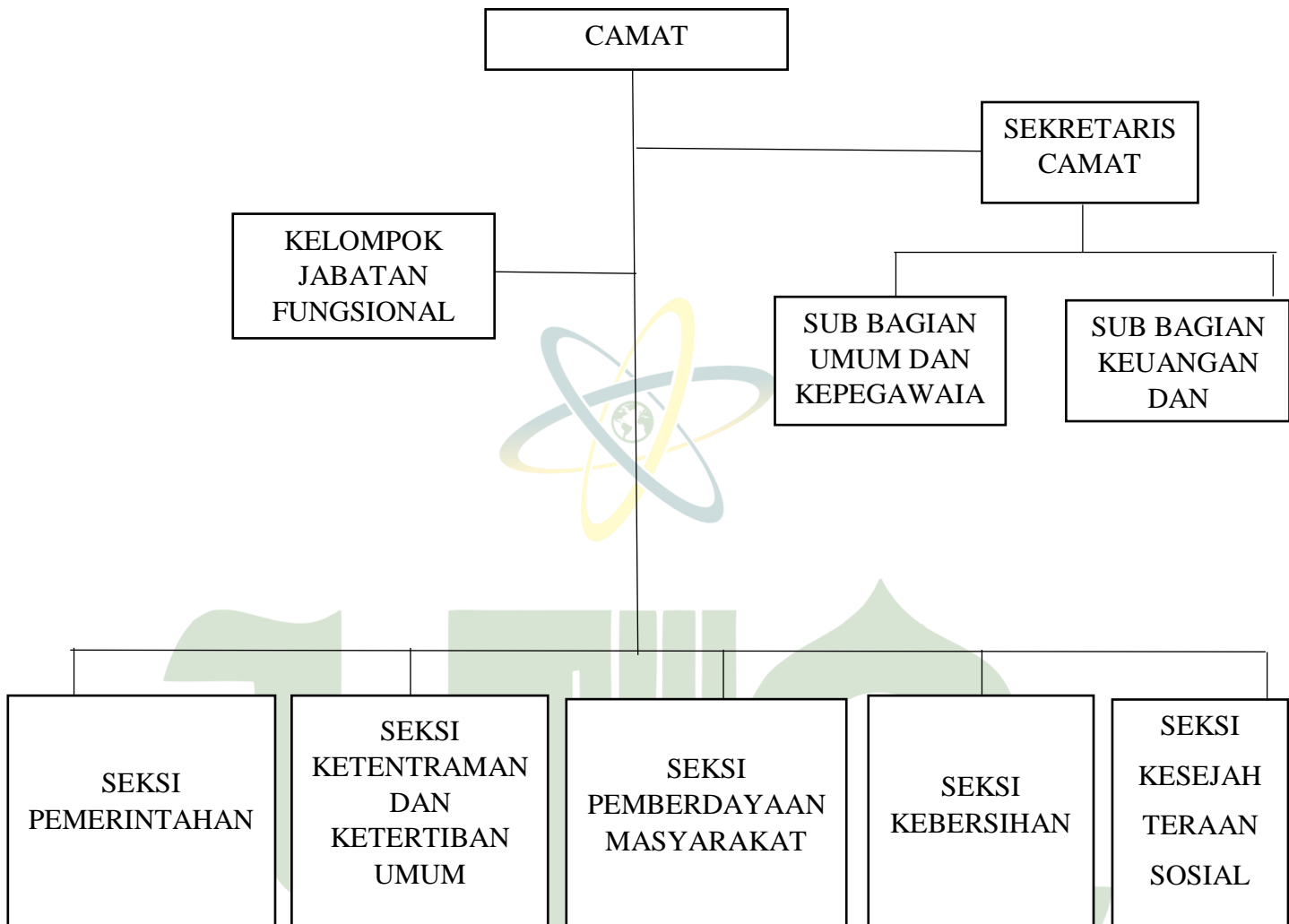
Setiap instansi atau organisasi yang berdiri pasti memiliki visi dan misi yang hendak dituju melalui beberapa tindakan yang dikerjakan secara bersama. Visi dan misi dalam suatu organisasi harus berpedoman terhadap kedisiplinan serta dengan penuh rasa tanggungjawab terhadap tupoksi yang diamanahkan.

Struktur organisasi adalah membagi aktivitas tugas, menampilkan cara kegunaan ataupun aktivitas yang beda-beda dikaitkan hingga batasan tertentu, menampilkan hierarki serta bagian hak kelompok dan menyajikan korelasi dari pelaporan. Dari struktur yang baik, maka beberapa tugas dimasukkan dalam golongan sebaik mungkin hingga bisa dituntaskan dengan tepat, sesuai arah, dan diawasi serta beberapa hasil bisa dikendalikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

Adapun struktur organisasi Kecamatan Sunggal yaitu sebagai berikut:



*Gambar 4. 1*

**Struktur Organisasi Kecamatan Sunggal**

SUMATERA UTARA MEDAN

Struktur organisasi adalah suatu alat untuk manajerial dalam menggapai tujuan serta juga menjadi struktur organisasi memiliki pengaruh yang penting dalam mengelola suatu organisasi atau dalam kelembagaan pemerintah.

#### **4. Uraian Tugas Pemerintahan Kecamatan Sunggal**

##### **a. Camat**

Camat merupakan pemimpin dalam suatu lingkup kecamatan dan merupakan perangkat daerah. Para pegawai pemerintahan pada tingkat kecamatan bertanggungjawab kepada Bupati melalui perantara sekretaris daerah Kabupaten atau Kota.

Uraian tugas umum Camat sebagai berikut:

- 1) Menentukan rencana aktivitas Kecamatan.
- 2) Melaksanakan pengurusan pemerintahan umum.
- 3) Melakukan koordinasi aktivitas memberdayakan masyarakat.
- 4) Melakukan koordinasi usaha pelaksanaan kesejahteraan dan ketentraman.
- 5) Melakukan koordinasi pengawasan dan perlakuan kebijakan daerah sampai bupati.
- 6) Melakukan koordinasi pengawasan fasilitas layanan.
- 7) Mengarahkan dan melakukan pengawasan aktivitas Desa dan Kelurahan,
- 8) Melakukan koordinasi pelaksanaan aktivitas pemerintah yang dilaksanakan dari bagian tugas pemerintahan daerah Kabupaten pada tingkatan Kecamatan.
- 9) Menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan.
- 10) Memonitoring, mengevaluasi, dan melakukan penilaian pencapaian tugas penyelenggaraan kerja anggota.

##### **b. Sekretaris Camat**

Uraian tugas umum Sekretaris Camat yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat rumusan rencana aktivitas Sekretariat Kecamatan;



- 2) Melakukan koordinasi urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, rumah tangga, dan program kecamatan;
- 3) Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan operasional, rencana strategis, dan rencana kerja;
- 4) Melakukan koordinasi pengisian formulir LHKPN, LHKASN, dan SKP di lingkungan Kabupaten;
- 5) Melakukan koordinasi rencana pembelian peralatan kebutuhan rumah tangga kecamatan serta pelaporan aset dan peralatan.
- 6) Membuat rumusan laporan keuangan Kecamatan;
- 7) Melakukan koordinasi pemantauan dan penilaian tindakan yang berhubungan pada urusan sekretariat distrik.
- 8) Melakukan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan;
- 9) Membuat rumusan bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- 10) Melakukan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (Sskm), Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan;

**c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Uraian tugas umum Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- 1) Membuat susunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Melakukan pelayanan manajemen, administrasi umum, dan personalia;
- 3) Melakukan dan pembinaan tata usaha Kecamatan;
- 4) Melakukan promosi administrasi kabupaten;
- 5) Melakukan koordinasi pembelian, inventaris, dan penghapusan produk;
- 6) Memudahkan warga Kecamatan untuk mengisi formulir SKP;
- 7) Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) sesuai bidang tugasnya;

- 8) Membuat susunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Aparatur Sipil Negara Kecamatan;
- 9) Memonitoring, mengevaluasi, dan melakukan penilaian pencapaian tugas penyelenggaraan tugas anggota;
- 10) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **d. Sub Bagian Keuangan dan Program**

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Program sebagai berikut:

- 1) Membuat kegiatan program untuk Subbagian Keuangan dan Program;
- 2) Menyelesaikan penyusunan laporan keuangan Daerah;
- 3) Mengelola uang dan program kecamatan secara administratif;
- 4) Membuat rencana kerja dan menilai rencana kerja kabupaten dan perubahan;
- 5) Menyusun rencana strategis tingkat kabupaten dan mengevaluasinya;
- 6) Mengumpulkan informasi dan menyusun semua LPPD, LKPJ, LKIP, dan formulir pelaporan lain yang diperlukan untuk lingkup Kabupaten;
- 7) Mengumpulkan informasi untuk LPPD, LKPJ, LKIP, dan semua jenis pelaporan lainnya sesuai dengan tanggung jawabnya;
- 8) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kecamatan, serta revisinya;
- 9) Menyusun pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja, dan keuangan kecamatan;
- 10) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Keuangan dan Program;

#### **e. Seksi Pemerintahan**

Adapun tugas umum Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- 1) Membuat jadwal kegiatan Bagian Pemerintahan;;
- 2) Memberikan pelayanan administrasi kepada pemerintah Kabupaten;
- 3) Mengikuti petunjuk pengelolaan pengelolaan Desa dan Kelurahan;
- 4) Mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;

- 5) Membantu fasilitasi, pembinaan koordinasi, dan pendataan yang berhubungan pada pelaksanaan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan, Organisasi Masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, dan Pendampingan Desa dan/atau Kelurahan;
- 6) Memberikan layanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berdasarkan bidang usahanya;
- 7) Membuat SOP (prosedur operasi standar) untuk departemen pemerintah;
- 8) Melakukan pemantauan, evaluasi, dan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan bawahan;
- 9) Melaporkan kepada atasan tentang bagaimana tugas dilaksanakan;
- 10) Memberitahu pengawas tentang pemikiran dan saran Anda;

**f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Adapun tugas umum Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- 1) Membuat program kegiatan Bagian Ketertiban dan Ketenteraman Umum;
- 2) Mendorong pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan memberikan bantuan dalam operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- 3) Membantu pertumbuhan dan fasilitasi unit perlindungan masyarakat melalui penguatan sumber daya manusia dan pengelolaan serta kesiapsiagaan bencana;
- 4) Bekerja sama dengan instansi terkait untuk mengkoordinasikan operasional pelaksanaan investigasi pelanggaran peraturan daerah dan memberikan fasilitasi teknis;
- 5) Bekerja sama dengan instansi terkait untuk merencanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan PEMILU;
- 6) Menangani penerbitan izin parkir dan pemungutan pembayaran parkir;
- 7) Memberikan layanan Administratif Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai bidang tugasnya;
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;

**g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

Adapun tugas umum Seksi Pemberdayaan Masyarakat:

- 1) Membuat kalender aktivitas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Menetapkan anggaran untuk aktivitas Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Melakukan pembinaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), serta lembaga, dinas, dan instansi terkait;
- 4) Bekerja sama dengan organisasi atau dinas terkait untuk mendorong pelaksanaan lomba desa;
- 5) Mengkoordinasikan upaya dengan organisasi terkait dalam pengembangan UKM dan koperasi;
- 6) Bekerja sama dengan organisasi terkait untuk menyelesaikan pemukiman kembali penduduk, rehabilitasi lingkungan, dan pemulihan tempat tinggal desa;

#### **h. Seksi Kebersihan**

Adapun tugas umum Seksi Kebersihan sebagai berikut:

- 1) Merencanakan aktivitas Seksi Kebersihan;
- 2) Merencanakan anggaran aktivitas Bagian Kebersihan;
- 3) Melaksanakan tugas penyehatan lingkungan pemukiman;
- 4) Mengkoordinasikan layanan kebersihan di wilayah perkotaan, pedesaan, dan pasar dengan organisasi terkait;

#### **i. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Adapun tugas umum Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- 1) Menyusun program kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 2) Memberikan sarana dengan merekomendasikan sektor Ketenagakeraan dan Ketrasmigrasian;
- 3) Memberikan sarana dengan merekomendasikan sektor Pendidikan Budaya dan Pariwisata;
- 4) Melakukan pembimbingan pada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat;

### **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Laporan Keuangan Kantor Camat Sunggal

Laporan keuangan Kantor Camat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang terbagi atas berikut ini.

**a. Laporan Realisasi Anggaran**

Adalah laporan yang menyajikan informasi perihal implementasi penghasilan, perbelanjaan, pengiriman, keuntungan, kekurangan, dan biaya yang menjelaskan dari realisasi anggaran yang dibandingkan pada satu periode keberjalanan pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

**Tabel 4. 2**

**Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sunggal 2021**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2021</b>	<b>REALISASI 2021</b>
<b>PENDAPATAN</b>	1.042.200.000,00	341.774.000,00
<b>DAERAH</b>	1.042.200.000,00	341.774.000,00
<b>PENDAPATAN ASLI</b>		
<b>DAERAH (PAD)</b>	1.042.200.000,00	341.774.000,00
Retribusi Daerah	7.849.373.243,00	6.897.043.091,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	7.764.045.899,00	6.897.043.091,00
<b>BELANJA OPERASI</b>	3.936.519.207,00	3.626.990.726,00
Belanja Pegawai		
Belanja Barang dan Jasa	3.827.526.692,00	3.270.052.365,00
<b>BELANJA MODAL</b>	85.327.344,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.327.344,00	0,00
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	(6.807.173.243,00)	(6.555.269.091,00)
<b>SISA LEBIH</b>	(6.807.173.243,00)	(6.555.269.091,00)
<b>PEMBIAYAAN</b>		
<b>ANGGARAN</b>		

Sumber :Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal

Jumlah pendapatan yang tersedia pada akhir periode yaitu pada tanggal 31 Desember senilai Rp. 341.774.000,00 yang didapat melalui penghasilan hasil retribusi daerah, sedangkan

untuk belanja pada akhir periode 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.897.043.091,00 dan adapun surplus/defisit sisa lebih dari pembiayaan anggaran sebesar Rp. 6.555.269.091,00.

**Tabel 4. 3**

**Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sunggal 2020**

<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN 2020</b>	<b>REALISASI 2020</b>
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	573.750.000,00	287.247.000,00
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	573.750.000,00	287.247.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	573.750.000,00	287.247.000,00
	6.666.142.216,00	6.156.008.323,00
<b>BELANJA</b>	6.608.652.216,00	6.101.658.323,00
<b>BELANJA OPERASI</b>	3.636.861.216,00	3.384.863.344,00
Belanja Pegawai	2.971.791.000,00	2.716.794.979,00
Belanja Barang dan Jasa	57.490.000,00	54.350.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	57.490.000,00	54.350.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(6.092.392.216,00)	(5.868.761.323,00)
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>		
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SI LPA)</b>	(6.092.392.216,00)	(5.868.761.323,00)

Sumber :Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal

Jumlah pendapatan yang tersedia pada akhir periode yaitu pada tanggal 31 Desember 2020 senilai Rp. 287.247.000,00 yang didapat dari pendapatan hasil retribusi daerah, sedangkan untuk belanja pada akhir periode 31 Desember 2020 senilai Rp. 6.156.008.323,00 dan adapun surplus/defisit sisa lebih dari pembiayaan anggaran sebesar Rp. 5.868.761.323,00.

Tabel 4. 4

## Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Sunggal 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	573.750.000,00	287.247.000,00
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>	573.750.000,00	287.247.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	573.750.000,00	287.247.000,00
<b>BELANJA</b>	6.666.142.216,00	6.156.008.323,00
<b>BELANJA OPERASI</b>	6.608.652.216,00	6.101.658.323,00
Belanja Pegawai	3.636.861.216,00	3.384.863.344,00
Belanja Barang dan Jasa	2.971.791.000,00	2.716.794.979,00
<b>BELANJA MODAL</b>	57.490.000,00	54.350.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.490.000,00	54.350.000,00
<b>SURPLUS/ (DEFISIT)</b>	(6.092.392.216,00)	(5.868.761.323,00)
<b>SISA LEBIH</b>	(6.092.392.216,00)	(5.868.761.323,00)
<b>PEMBIAYAA N ANGGARAN (SILPA)</b>		

Sumber :Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal

Jumlah pendapatan yang tersedia pada akhir periode yaitu pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. yang didapat dari pendapatan hasil retribusi daerah, sedangkan untuk belanja pada akhir periode 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.156.008.323,00 dan adapun surplus/defisit dari pembiayaan anggaran sebesar Rp. 287.247.000,00.

**b. Laporan Operasional**

Laporan Operasional mendeskripsikan mengenai perbandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran yang mengandung unsur pendapatan dan beban selama periode 1 Januari hingga 31 Desember

**Tabel 4.5**  
**Laporan Operasional Kecamatan Sunggal 2019, 2020, 2021**

<b>URAIAN</b>	<b>SALDO 2021</b>	<b>SALDO 2020</b>	<b>SALDO 2019</b>
<b>KEGIATAN OPERASION AL PENDAPATA N – LO</b>	341.774.000,00	287.247.000,00	301.304.000,00
<b>PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)-LO</b>	341.774.000,00	287.247.000,00	301.304.000,00
Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO	341.774.000,00	287.247.000,00	301.304.000,00
Hasil Pengelolaa n Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00



<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO</b>	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	0,00	0,00	0,00
<b>BEBAN</b>	7.258.088.273,00	6.415.673.733,00	6.578.369.418,00

Beban Pegawai	3.626.990.726,00	3.366.847.508,00	3.525.850.806,00
Beban Barang dan Jasa	3.270.034.043,00	2.716.015.795,00	2.714.333.595,00
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	338.185.017,00
Beban Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	299.256.428,00	271.003.354,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.807.076,00	61.807.076,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(6.916.314.273,00)</b>	<b>(6.128.426.733,00)</b>	<b>(6.277.065.418,00)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			0,00
Surplus Penuaian/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya- LO	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/P ertukaran/P elepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang- LO	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00

Lainnya- LO			
<b>SURPLUS/D EFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASION AL</b>	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/D EFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	(6.916.314.273,00)	(6.128.426.733,00)	0,00
<b>POS LUAR BIASA</b>			(6.277.065.418,00)
Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS /DEFISIT- LO</b>	(6.916.314.273,00)	(6.128.426.733,00)	(6.277.065.418,00)

Sumber :Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal

**c. Neraca**

Neraca yaitu elemen pelaporan finansial yang mendeskripsikan mengenai status finansial pada sebuah entitas laporan yang berisi asset, tuntutan, dan ekuitasnya.

**Tabel 4.6**  
**Neraca Kecamatan Sunggal 2019-2021**

<b>URAIAN</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00

Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
Piutang Lain-lain AD yang Sah	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00

Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00
Persediaan	2.655.700,00	2.936.700,00	1.743.200,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>2.655.700,00</b>	<b>2.936.700,00</b>	<b>1.743.200,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00	0,00
Investasi kepada Badan	0,00	0,00	0,00



Usaha Milik Daerah			
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	0,00
Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00

en Lainny a			
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyert aan Modal	0,00	0,00	0,00
Investa si- Pember ian Pinjam an Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH INVESTASI</b>	0,00	0,00	0,00

<b>JANGKA PANJANG</b>			
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	310.390.000,00	310.390.000,00	310.390.000,00
Peralatan dan Mesin	4.266.919.435,00	3.735.480.535,00	3.188.330.535,00
Gedung dan Bangunan	1.598.403.637,00	1.598.403.637,00	1.598.403.637,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Aset Tetap Lainnya	820.500,00	820.500,00	820.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(3.330.355.142,00)	(3.037.647.887,00)	(2.704.837.457,00)

<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	2.848.178.430,00	2.609.446.785,00	2.395.107.215,00
<b>DANA CADANGAN</b>			
Dana Cada ngan	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLA H DANA CADAN GAN</b>	0,00	0,00	0,00
<b>ASET LAINNYA</b>			
Tagiha n Jangka Panjan g	0,00	0,00	0,00
Kemitr aan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwuj ud	0,00	0,00	0,00

Aset Lain- lain	6.419.750,00	6.419.750,0	5.616.000,00
Akumu- lasi Amorti- sasi Aset Tidak Berwuj- ud	0,00	0,00	
Akumu- lasi Penyus- utan Aset Lainny- a	0,00	0,00	
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	6.419.750,00	6.419.750,0	5.616.000,00
<b>JUMLAH ASET</b>	2.857.253.880,00	2.617.999.485,00	2.402.466.415,00
<b>KEWAJIBA- N</b>			
KEWAJI- BAN JANGKA PENDEK			

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
Bagian Lanjar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima	0,00	0,00	0,00

Dimu ka			
Utang Belan ja	994.835,00	1.294.157,00	18.895.681,00
Utang Jangk a Pende k Lainn ya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJI BAN JANGKA PENDEK	994.835,00	1.294.157,00	18.895.681,00
KEWAJI BAN JANGKA PANJAN G			
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga	0,00	0,00	

Keuangan Bukan Bank			
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00	
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>994.835,00</b>	<b>1.294.157,00</b>	<b>18.895.681,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
EKUITAS	2.856.259.045,00	2.616.705.328,00	2.383.570.734,00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>	<b>2.857.253.880,00</b>	<b>2.617.999.485,00</b>	<b>2.402.466.415,00</b>

Sumber :Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas

Adalah elemen dari pelaporan finansial yang menyediakan seminimalnya beberapa pos ekuitas pertama, keuntungan atau kekurangan terhadap waktu berjalan dan beberapa perbaikan otomatis menambahkan ataupun mengurangi ekuitas akhirnya.

**Tabel 4.7**

#### **Laporan Perubahan Ekuitas Kecamatan Sunggal 2019-2021**

URAIAN	2021	2020	2019
EKUITAS AWAL	2.616.705.328,00	2.383.570.734,00	2.170.456.701,00



SURPLUS/DEFISI SIT-LO	(6.916.314.273,00)	(6.128.426.733,00)	(6.277.065.418,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KE SALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Ekuitas	600.598.899,00	492.800.004,00	469.810.000,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap			0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya			(23.490.501,00)
Koreksi Nilai Persediaan			0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.555.269.091,00	5.868.761.323,00	6.043.859.952,00
EKUITAS AKHIR	2.856.259.045,00	2.616.705.328,00	2.383.570.734,00

Sumber :Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal

**e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**

Di Pemerintah Kantor Camat Sunggal Kab. Deli Serdang menjelaskan tentang komponen laporan keuangan Kecamatan Sunggal yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga dijelaskan mengenai landasan hukum penyusunan laporan keuangan pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Dasar hukum yang mendasar dasar pembuatan susunan Laporan Keuangan Pemerintahan Kab. Deli Serdang adalah:

- a. Perundang-undangan Dasar Tahun 1945, terkhusus yang mengatur Keuangan Negara;
  - b. Perundang-undangan No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara
  - c. Perundang-undangan No 01 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara
  - d. Perundang-undangan No 15 Tahun 2004 mengenai Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  - e. Perundang-undangan No 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - f. Perundang-undangan No 23 Tahun 2015 mengenai Pemerintah Daerah
  - g. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
  - h. Kebijakan pemerintahan No 54 Tahun 2005 mengenai Pinjaman Daerah
  - i. Kebijakan pemerintahan No 6 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- b. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang**

Sistem akuntansi pemerintahan daerah yaitu suatu rangkaian proses yang diawali dengan tahapan mengumpulkan informasi, membuat catatan transaksi, penggolongan transaksi serta ringkasan atas peristiwa finansial menghasilkan tanggung jawab penyelenggaraan APBD baik dilaksanakan dengan sendiri ataupun dengan komputerisasi.

Pada rumusan masalah dijelaskan bahwa tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengidentifikasi penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Sunggal. Pada penelitian terdahulu menurut Sophia Molinda Kakisina (2020) dengan menggunakan metode analisis deskriptif dalam penelitiannya, mengemukakan hasil temuan bahwa pada kantor camat Kecamatan Gunungsitoli Utara belum cukup maksimal dalam penerapan sistem akuntansi

keuangan pemerintah daerah dikarenakan tidak membuat laporan penyusutan aset tetap dalam laporan keuangannya.

Pada penelitian terdahulu yang lain juga dijelaskan oleh Ade Husna,dkk (2022) yang berjudul Pengaruh kompetensi pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa kompetensi pengelolaa keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Besar. Dari kedua contoh penelitian terdahulu dapat kita simpulkan bahwa pentingnya mengikuti sistem akuntansi keunagan pemerintah yang sesuai aturan dan perlunya kopetensi bagi sumber daya manusia yang menangani keuangan kantor camat agar kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kecamatan dapat dikatakan baik.

Berdasarkan pelaporan keuangan kantor Camat Sunggal yang sudah peneliti jelaskan tersebut mendeskripsikan tidak terdapat kekeliruan pembuatan susunan pelaporan keuangannya, baik itu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas hingga dengan Catatan atas Laporan Keuangan sudah disusun sesuai peraturan yang berlaku.

Dari hasil wawancara yang sudah dilaksanakan diperoleh berbagai hal yang menyangkut mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan Pemerintah yaitu terdapat perubahan sistem aplikasi laporan keuangan pemerintah daerah yang terus menerus sehingga menimbulkan kesulitan bagi bendahara umum dalam mengikuti perkembangan yang terbilang begitu sering dan dalam waktu yang cepat.

Dijelaskan dalam wawancara tersebut bahwa pihak dari Kabupaten Deli Serdang memang sudah mengadakan Bimbingan Teknik (BIMTEK) namun Bimtek tersebut belum cukup maksimal dan belum bisa dikatakan sudah mencapai target dikarenakan ditemukan di lapangan untuk pengaplikasian bimtek belum maksimal dipahami oleh para bendahara di Kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara juga didapat begitu seringnya terjadi perubahan mengenai sistem aplikasi laporan keuangan dan lebih keseringan para bendahara di Kecamatan diarahkan untuk memahami sendiri (otodidak) perihal perubahan tersebut. Perubahan aplikasi tersebut juga mengakibatkan para pegawai keuangan terkhusus di

Kecamatan Sunggal tersebut kewalahan dengan aplikasi yang terus-menerus mengalami perubahan tersebut.

Pada hasil wawancara juga dinyatakan bahwa adanya perubahan aturan seperti potongan dalam suatu kebijakan seperti aturan pajak dan potongan BPJS yang hal tersebut hanya disampaikan melalui web pemerintah kabupaten saja dan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak kantor camat secara langsung dan hal tersebut juga membuat sedikit kendala pada pembuatan laporan pada Kantor Camat Sunggal.

Perkembangan teknologi dan perkembangan pengelolaan sistem yang sesuai dengan seperangkat aturan yang sesuai dengan masa sekarang (regulasi) sangat mempengaruhi kebutuhan stakeholder mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengambilan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Kantor Camat Sunggal menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pada Kantor Camat Sunggal sudah cukup baik, namun harus lebih diasah kembali kemampuan atau keahlian para sumber daya manusia terkhusus di bidang keuangan untuk tetap terus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman yang serba teknologi seperti saat ini.

Pada Kantor Camat Sunggal dalam pendekatan dasar akuntansi nya juga sudah menerapkan basis akrual yang dimana ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, yang dimana dalam proses pencatatan akuntansi, pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya transaksi atau saat terjadi penambahan nilai di dalam jangka waktu tertentu.

Laporan keuangan pemerintah daerah sewajibnya diberikan pada Badan Pemeriksaan Keuangan paling lama tiga bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran, berdasarkan pada kebijakan Pemerintahan No. 12 Tahun 2019 mengenai tata kelola keuangan daerah. Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pada Kantor Camat Sunggal selalu tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan Kecamatan Sunggal kepada pihak Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah dijelaskan bahwa ada beberapa sistem pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah yaitu Single entry, double entry dan triple entry. Pada kantor Camat Sunggal dalam laporan keuangan nya sudah menerapkan sistem tersebut.

## **Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kantor Camat Sunggal dengan PP.No 71 Tahun 2010 Tentang Kualitas Laporan Keuangan**

Kualitas laporan keuangan mempunyai persyaratan dilakukan akuntansi secara tepat. Untuk penyusunan laporan keuangan setiap komponen-komponen nya harus disajikan dengan penuh. Jelas dalam artian yaitu pelaporan keuangannya tersusun telah mencukupi beberapa syarat seperti sesuai, bisa dipahami, bisa dimengerti, dapat dilakukan pengujian, sesuai waktu dan dapat dibandingkan.

Dalam rumusan masalah di bab 1 dijelaskan bahwa penelitian ini ingin mengetahui apakah kualitas laporan keuangan kantor camat Sunggal telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Laporan Realisasi Anggaran (SAL), Laporan Perubahan Saldo Kelebihan Anggaran (SAL), Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah yang didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010. Namun, Kantor Kecamatan Sunggal tidak mencantumkan Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Lebih Anggaran dalam laporan keuangannya. Namun, pada kantor Camat Sunggal tidak membuat laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam pembuatan laporan keuangannya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran memberikan rincian lebih lanjut tentang surplus atau defisit nya saldo anggaran dari tahun sebelumnya ke tahun pelaporan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana mulai tahun kelima dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah dimaksudkan atau pada penyusunan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran, pemerintah daerah sudah harus menyusun laporan keuangan berbasis accrual dan salah satu komponen laporan tersebut adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Kantor Camat Sunggal Kabupaten Deli Serdang sudah menerapkan penyajian laporan keuangan berbasis accrual untuk periode tahun 2019-2021, namun untuk penyajian laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih tahun 2019-2021 kantor Camat Sunggal tidak menyajikannya padahal dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran terdapat ada sisa saldo anggaran di akhir periode pelaporan.

Suatu laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat dikatakan baik apabila memenuhi 4 karakteristik laporan keuangan agar dapat terwujudnya informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya serta bisa bermanfaat untuk berbagai pihak yang memerlukan yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, pihak kantor camat menginformasikan bahwa mereka telah membuat seluruh komponen laporan keuangan pada Kantor Camat Sunggal, namun pada hasil yang diperoleh dari data laporan keuangan kantor Camat tidak menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam laporan keuangannya.

Dalam Laporan keuangan kantor Camat Sunggal belum sepenuhnya menerapkan 4 kriteria jika laporan keuangan yang dapat dikatakan berkualitas, khususnya pada kantor camat Sunggal dapat dianggap relevan yaitu kriteria yang pertama karena pengetahuan yang didapat mempengaruhi tindakan pengguna dengan memudahkan pengguna untuk melakukan evaluasi peristiwa waktu sebelumnya dan kini, membuat prediksi tentang masa depan, dan memvalidasi atau memperbaiki temuan dari penilaian mereka sebelumnya. Sehingga, data laporan keuangan yang bersangkutan dapat dikaitkan dengan tujuan yang dimaksudkan.

Kriteria yang kedua yaitu andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan akurat, menyajikan semua fakta dengan jujur, dan dapat dikonfirmasi secara independen, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Kantor Kecamatan Sunggal dapat dipercaya. Dalam hal ini, kantor camat Sunggal belum dapat dikatakan andal dalam laporan keuangannya karena pada laporan keuangannya belum menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

Kriteria yang ketiga, dalam laporan keuangan Kantor Camat Sunggal dapat dikatakan dapat dibandingkan karena apabila informasi laporan keuangan bisa diperbandingkan pada pelaporan keuangan waktu lalu ataupun organisasi laporan secara umum, informasi tersebut akan lebih bermanfaat. Perbandingan di dalam dan di luar dimungkinkan. Jika perusahaan menggunakan prinsip akuntansi yang serupa dari tahun ke tahun, perbandingan internal bisa dilakukan. Jika entitas yang diperbandingkan menerapkan peraturan akuntansi yang serupa, perbandingan eksternal bisa dilakukan. Suatu organisasi pemerintah harus menyatakan setiap perubahan dalam

periode terjadinya jika mereka menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih unggul dari yang sudah digunakan.

Selanjutnya kriteria yang keempat yaitu dapat dikatakan bahwa laporan keuangan kantor kecamatan Sunggal dapat dipahami karena informasi yang disediakan di sana disediakan oleh pengguna dan dijelaskan dengan cara dan terminologi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Sehingga memudahkan pihak-pihak yang ingin membaca laporan keuangan kantor camat mudah memahami laporan keuangan tersebut.

### **c. Relevansi Penyajian Laporan Keuangan Kantor Camat Sunggal Dengan Akuntansi Dalam Perspektif Islam**

Pada surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan bahwa dianjurkan dan diharuskan para pemegang amanah untuk mengelola keuangan Kantor Camat Sunggal untuk memiliki iman dan rasa takut akan murka Allah dalam pembuatan laporan keuangan. Pada surah tersebut juga ditekankan bahwa segala transaksi yang ada di sebuah entitas harus dicatatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada rakyat. Pada Kantor Camat Sunggal sudah menerapkan hal tersebut yaitu dengan mencatat segala bentuk transaksi baik itu pengeluaran atau pemasukan pada Kecamatan Sunggal.

Dalam akuntansi juga dikenal dengan konsep akuntabilitas atau bisa dikenal dengan pertanggungjawaban. Konsep pertanggungjawaban terdapat dalam Q.S Al- Zalzalah ayat 7-8 yaitu: “Oleh karena itu, siapa saja yang berbuat baik seperti berat atom pastinya memperhatikannya dan menanggapi, dan siapa saja yang berbuat jahat demikian pastinya menyadarinya (balasan)”. Makna arti ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang pasti akan ditanyakan perihal pertanggungjawaban manusia terhadap sesuatu yang sudah dibuat semasa hidup di dunia. Dan manusia mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah kelak di akhirat. Sama halnya dengan profesi akuntan, seorang akuntan publik dapat dimintai tanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah dilakukan untuk menyusun laporan keuangan pemerintahan. Pemerintah daerah juga diamanahkan untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh lingkungan sekitar yang disebut dengan kepemilikan umum atau aset. Barang milik bersama (al-amwal al-‘ammah) yaitu kekayaan yang bukan termasuk kepemilikan

perseorangan tetapi kekayaan yang digunakan untuk keperluan orang banyak dan berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat umum. Dan kekayaan ini haruslah dijaga oleh pihak yang berwenang sebagai pemegang amanah rakyat. Pada Kantor Camat Sunggal sendiri berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa sudah dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan amanah sebagai pengelola keuangan di kecamatan dan sudah semaksimal mungkin menjalankan amanah yang telah diberikan kepercayaan oleh rakyat.

Tentang riset ini peneliti menerapkan persamaan Dean J. Champion menjelaskan tingkatan keselarasan dengan berikut:

- a. 0%-25% : artinya penggunaan cara kerja akuntansi finansial pemerintah daerah dan mutu pelaporan keuangan telah tidak baik
- b. 25%-50% : artinya penggunaan cara kerja akuntansi finansial pemerintah daerah dan mutu pelaporan keuangan telah kurang baik
- c. 50%-75% : artinya penggunaan cara kerja akuntansi finansial pemerintah daerah dan mutu pelaporan keuangan telah cukup baik
- d. 75%-100% : artinya penggunaan cara kerja akuntansi finansial pemerintah daerah dan mutu pelaporan keuangan telah sangat baik.

Dalam melakukan perhitungan persentase tingkatan kesesuaian sesuai dengan persamaan Dean J. Champion yakni:

$$\text{Persentase} = \frac{\sum \text{Jumlah Jawabannya}}{\sum \text{Jumlah Jawaban Penelitian}} \times 100$$

$$\text{"Ya"} = \frac{19}{24} \times 100 = 79 \%$$

$$\text{"Tidak"} = \frac{5}{24} \times 100 = 21\%$$

Dari hasil persentase yang didapat melalui perhitungan responden tersebut yakni 79 % jawaban mengatakan "Ya". Sementara 21 % jawaban wawancara mengatakan "Tidak" sehingga penulis mengambil kesimpulan penggunaan sistem akuntansi finansial daerah dan mutu pelaporan keuangannya di Kantor Camat Sunggal sudah sangat baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa uraian yang sudah penulis jelaskan berdasarkan berbagai data dan juga informasi penelitian lalu dianalisa tentang sistem akuntansi yang diterapkan untuk menambah tingkat mutu Laporan Keuangan di Kantor Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Sunggal sudah baik begitu juga dengan output yang dihasilkannya yaitu Laporan Keuangan Kecamatan Sunggal Kabupaten sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu terdapat beberapa komponen yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, namun pada Kantor Camat Sunggal tidak menyajikan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas dan juga dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pihak kantor Camat Sunggal sedikit kewalahan dengan pembaharuan sistem akuntansi yang terus mengalami perubahan. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Kantor Camat Sunggal kurang bisa dinyatakan baik, hal ini dikarenakan masih kurang maksimalnya pengadaan BIMTEK bagi sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dalam pengoperasian sistem akuntansi dan kurang terdapat penyelenggaraan sosialisasi dan pengadaan latihan dengan rutin yang diterapkan Kabupaten Sunggal Deli Serdang untuk Bendahara Kec. Sunggal, jadi pengaruh masalah itu bisa menyebabkan mutu pelaporan keuangan yang berkurang oleh Kantor Camat Sunggal.

2. Pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dijelaskan tentang karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan suatu instansi dapat dikatakan berkualitas yaitu jika memenuhi keempat karakter tersebut yaitu dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan. Pada kantor Camat Sunggal belum dapat memenuhi keempat karakteristik kualitatif tersebut dikarenakan dalam karakteristik yang kedua yaitu andal dikarenakan pada laporan keuangan kantor camat tidak menyajikan laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yaitu dengan berikut :

1. Sebaiknya di tahun selanjutnya pada kantor Kec. Sunggal lebih dapat beradaptasi lagi dengan perkembangan teknologi yang dimana akan selalu ada perubahan dalam sistem akuntansi keuangan daerah dan juga bagi pihak Kabupaten Deli Serdang harus lebih dimaksimalkan pengadaan Bimbingan Teknik dan juga apabila ada perubahan dalam kebijakan seharusnya dikomunikasikan langsung dengan pihak kecamatan bukan hanya sekedar mengumumkannya melalui web saja. Pihak Kantor Camat Sunggal untuk periode selanjutnya juga harus menyajikan laporan keuangan yang memuat komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
2. Agar kualitas laporan keuangan di kantor Kecamatan Sunggal mempunyai mutu yang lebih baik, dapat dengan pembuatan pelatihan khusus bagi para pegawainya yang memiliki wewenang mengenai sesuatu finansial dan diberikan saran juga untuk memfokuskan pegawainya dengan pendidikan ekonomi atau akuntansi sebagai tugas pengurusan finansial di Kantor

tersebut sebab pengetahuan yang telah mereka miliki tentang keuangan lebih baik serta guna beberapa hambatan berupa kurang paham terhadap perubahan sistem yang terkesan cepat. Kualitas laporan keuangan kantor Camat dapat dikatakan baik, pihak kantor camat Sunggal harus menerapkan dengan sepenuhnya 4 kriteria laporan keuangan berkualitas yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kota Medan. (2020). Kecamatan Medan Sunggal Dalam Angka 2019. (Vol. 59).
- Djanegara, M. S. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bogor: KESATUAN PRESS.
- Desnovira, April (2019). PERBANDINGAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA OPD KECAMATAN SALIMPAUNG SEBELUM DAN SETELAH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010, IAIN Batusangkar
- Fauziah, I. (2018). Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: Penerbit Ilmu.
- Fauziah, E. M. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa, 4(2), 196–209. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i2.6386>
- Febransyah, Astari, Dinda. (2021). ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA KANTOR CAMAT TANJUNG BATU KAB. OGAN ILIR. Jurnal Ratri (Riset Akuntansi Tridinanti), Vol 2 (No 2).
- Harahap, e. a. (2015). Hadis Hadis Ekonomi. Medan: KENCANA.
- Harmain, e. a. (2019). Pengantar Akuntansi 1. Medan: MADENATERA.
- Husna, Ade,dkk. (2022). Pengaruh Kompetensi Pengelolaan Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Serambi Konstruktif, Vol 4 (Nomor 2)*,
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. J. (2018). M. Natsir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1999) h. 234 45. 45–51.
- Kakisina, S. M. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Utara. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen PEMBNAS*,7(1),53–62.

<https://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/view/95%0Ahttps://ejournal.stiepembnas.ac.id/index.php/jampembnas/article/viewFile/95/55>

Kamila, H. H. (2015). AKUNTANSI SYARIAH Sebuah Tinjauan Implementatif. UIN Sumatera Utara: FEBI UIN-SU PRESS.

Marliyah, R. D. (2021). Akuntansi Syariah. Medan: Febi UIN-SU PRESS.

Masnila, N. (2021). AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. Solok, Sumatera Barat: CV. MITRA CENDEKIA MEDIA.

Molle, Suenita Sarah, Manafe, A. Henny, Perseveranda. (2022). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, Vol 4 (3). <https://dinastirev.org/JIMT>,

Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2020). Accountability in the Management of Village Fund From The Islam Perspective. *Jurnal Ilmiah Akuntansi. Vol 4 (No.3)*

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.

Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 238/PMK.05/2011(2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/127242/pmk-no-238pmk052011>

PEMKAB DELI SERDANG. (2017). Profil Kabupaten Deli Serdang

<https://profil.deliserdangkab.go.id/assets/uploads/profil/Profil-Deli-Serdang-Tahun-2017.pdf>

Pratama, W. W. (2020). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Camat Semadam Kabupaten Aceh Tenggara). Medan.

Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 64 Tahun 2013 tentang PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH. Kebijakan Akuntansi, 2013.

- Siregar, S. (2013). AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAK/SEDEKAH SESUAI PSAK 109. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Suhendra, J. d. (2020). Akuntansi Pemerintah Edisi 1. Bandung: CV.MEDIA SAINS INDONESIA.
- Suryanto. (2019). Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Jurnal Agregasi, Volume 7 (Nomor 2). <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>
- Susanti, H. K. (2020). Akuntansi Pemerintah. Bandung: CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Zeny Antika, Yunika Murdayanti, & Hafifah Nasution. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Wahana Akuntansi, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

**LAMPIRAN**  
**Dokumentasi Wawancara**



**Lampiran**  
**Daftar Wawancara**

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan oleh Kantor Kecamatan Sunggal telah terelalisasikan dengan baik?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang digunakan di Kantor Kecamatan Sunggal sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku?
3. Dengan adanya penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, bagaimanakah kantor Kecamatan Sunggal menerapkan laporan keuangan yang efektif?
4. Apasaja Keuntungan yang diperoleh oleh Kantor Kecamatan Sunggal setelah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
5. Bagaimana Kegiatan pelaporan keuangan di Kantor Kecamatan Sunggal sebelum dan sesudah menerapkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah?
6. Apasajakah hambatan - hambatan yang terjadi dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di Kantor Camat Sunggal?
7. Apasajakah permasalahan yang ditemukan mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh Kantor Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ?
8. Apakah Kantor Kecamatan Sunggal masih terjadi keterlambatan dalam hal melaporkan laporan keuangannya?



## Lampiran

### Wawancara Dalam Bentuk Ceklist

#### Sistem akuntansi keuangan pemerintahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Sistem akuntansi yang diterapkan oleh Kantor Camat Sunggal sesuai dengan PP No.12 Tahun 2019	√	
2.	Apakah sudah diterapkan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Camat Sunggal	√	
3.	Apakah transaksi keuangan pada Kantor Camat Sunggal dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi.	√	
4.	Apakah Kantor Camat Sunggal melaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.	√	
5.	Apakah setiap transaksi keuangan pada Kantor Camat Sunggal didukung oleh bukti transaksi.	√	
6.	Apakah Kantor Camat Sunggal semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.	√	
7.	Apakah Kantor Camat Sunggal melakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.	√	

8.	Apakah Kantor Camat Sunggal melakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos masing-masing.	√	
9.	Apakah sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan.	√	
10.	Apakah pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi.	√	
11.	Apakah pelaporan Laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.	√	
12.	Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktifitas keuangan dimasa lalu.	√	
13.	Apakah laporan keuangan menyediakan informasi yang mampu memprediksi masa yang akan datang.		√
14.	Apakah Penyajian laporan keuangan tepat waktu sesuai periode akuntansi.	√	
15.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang lengkap mencakup semua informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.		√

16.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang wajar dan jujur.	√	
17.	Informasi laporan keuangan apabila diuji oleh pihak berbeda akan mewujudkkan simpulan yang berbeda.		√
18.	Apakah informasi laporan keuangan kantor camat Sunggal berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.		√
19.	Apakah laporan keuangan menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	√	
20.	Apakah laporan keuangan kantor camat Sunggal menghasilkan informasi yang dapat dibandingkan dengan entitas lain yang menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.	√	
21.	Apakah informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.	√	
22.	Apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Camat Sunggal sudah disajikan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.	√	

23.	Apakah Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Sunggal sudah sepenuhnya memiliki kualitas yang baik.		√
24.	Apakah Kantor Camat Sunggal mengikuti suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan.	√	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Jukhairia Ritonga

NIM : 0502913217

Tempat/Tgl Lahir : Sei-semayang, 20Juli 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl. Medan-Binjai Km 13 Kongsi

Email : [jukhairiaritonga2071@gmail.com](mailto:jukhairiaritonga2071@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 101733 (2007-2013)
2. SMP NEGERI 4 SUNGGAL (2013-2016)
3. SMA NEGERI 1 SUNGGAL (2016-2019)
4. S1 AKUNTANSI SYARIAH UINSU MEDAN (2019-2023)

### Pengalaman

#### Organisasi

1. Wakil Sekretaris Rohis SMA N 1 SUNGGAL (2017-2018)
2. Staff Divisi Keakhwatan LDK FEBI UINSU (2021-2022)
3. Sekretaris Divisi Kaderisasi LDK FEBI UINSU (2022-2023)
4. Sekretaris Departemen Dana Dan Usaha LDKAL-IZZAH UINSU (2023-2024)